



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



DINAS PENDIDIKAN
JL. BRIGJEND H. HASAN BASRY KM.2 RANTAU TELP. (0517) 31040
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya good government merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Tapin menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan yang setiap tahun secara bertahap terus diupayakan ditingkatkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara bertahap pula telah dilaksanakan berbagai progrm pembangunan pendidikan nasional guna merealisasikan target-target pembangunan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari kekurangan atau kesalahan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Melalui laporan ini, Dinas Pendidikan berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang apa yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin selama kurun waktu 1 (satu) Tahun dari bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2020 dan menjadi dasar yang berkesinambungan untuk melanjutkan

pembangunan pendidikan demi masa depan anak didik yang berkehidupan, beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hanya dengan kekuatan dari yang maha kuasa segala yang kita lakukan dapat terwujud. Semoga amanah pendidikan yang kita emban dan pelaksanaannya mendapat ridho dari Allah SWT Amin ya Robbal 'Alamin.

Rantau, Januari 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Hi. AHLUL JANAHA, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19641012 198305 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP), Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas Pendidikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin telah melaksanakan kegiatan rutin maupun pembangunan dengan capaian target/realisasi anggaran belanja sebesar sejumlah Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, anggaran untuk dana belanja sejumlah **Rp. 235.537.550.286,-** yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa Kemudian Belanja Modal **Rp. 6.681.570.730,.** Alokasi belanja belanja operasi **Rp. 224.331,227,100,-** belanja langsung sebesar **Rp. 14,779,623,500,-**

Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2020 maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Anggaran Dinas pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020 bisa dikatakan berkinerja baik dengan alokasi dana Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 anggaran untuk dana belanja sejumlah **Rp. 235.537.550.286,-** terealisasi **Rp 212.645.562.705,52,- (90,28%)**, yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja Operasi dan belanja Modal. Alokasi **belanja Operasi Rp. 213.411.128.386** terealisasi **Rp 190.805.625.076 (92,23%)**, - serta **Belanja Modal** sebesar **Rp. 22.126.421.900** terealisasi **Rp. 21.839.937.629,52,- (98,71%)**. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan juga efisiensi dana serta waktu pelaksanaan kegiatan, dari yang seharusnya 100% .

Untuk realisasi capaian kinerja Dinas Pendidikan yaitu : Persentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B 25,69%, Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B

21,42%, Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B 79,21%, Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B 96,15%, Rata rata nilai US/UN SD/MI 68,23, Rata rata nilai US/UN SMP/MTs 78,91. Serta persentase guru yang professional (bersertifikasi) sebesar 50,06%. Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran, program dan kebijakan menunjukkan penilaian yang baik. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut diinterpretasikan bahwa kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin termasuk kategori baik.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang secara normatif ditunjukkan dalam angka-angka/nilai kuantitatif saja. Namun keberhasilan pencapaian kinerja, yang terpenting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja..

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tahun 2020 untuk menjadi bahan proses selanjutnya.

Rantau, Januari 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Hj. AHLUL JANAHA, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641012 198305 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	10
1.3 Tindak lanjut Laporan Hasil evaluasi Tahun 2019	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin	13
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja.....	30
3.2 Realisasi Anggaran.....	86
BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan.....	95
4.2 Saran	96
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja (LK) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tugas pokok dan fungsi ini sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin serta Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tapin , serta Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan, yang diperbaharui lagi dengan Peraturan bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan maka restrukturisasi tataran organisasi mengalami perubahan secara total termasuk didalamnya membentuk kedudukan satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dan UPT Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Pengelola Bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dan UPT Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Pengelola Bidang Pendidikan.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,
2. Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal,

3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,
4. Pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dan perizinan pendidikan;
5. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah,
6. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dan administrasi terhadap UPT,
7. Pengelolaan kesekretariatan, dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Sekretariat,
2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar,
4. Bidang Pembinaan sekolah Menengah
5. Bidang Ketenagaan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, asset dan administrasi kepegawaian serta mengelola pelaksanaan tugas pembantuan. Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan,
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- b. Sub Bagian Keuangan,
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Tugas Pembantuan,
Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, aset, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian serta menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

2. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri atas

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian,
Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise kurikulum dan penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana,
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non formal
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peserta didik dan pembangunan karakter pada PAUD dan Pendidikan Non formal.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah dasar mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian,
Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise kurikulum dan penilaian pada sekolah dasar.
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana,
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar.
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter,
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peserta didik dan pembangunan karakter pada sekolah dasar.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah pertama mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian,
Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise penyelenggaraan kurikulum dan penilaian pada sekolah menengah pertama.
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana,
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter,
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peserta didik dan pembangunan karakter pada sekolah menengah pertama.

5. Bidang Ketenagaan

Bidang Ketenagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal.

Bidang Ketenagaan terdiri atas

- a. Seksi Pendidik tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal,
Seksi Pendidik tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendidik tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal.
- b. Seksi Pendidik tenaga kependidikan sekolah dasar,
Seksi Pendidik tenaga kependidikan sekolah dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendidik tenaga kependidikan sekolah dasar
- c. Seksi Pendidik tenaga kependidikan sekolah menengah pertama,
Seksi Pendidik tenaga kependidikan sekolah menengah pertama mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendidik tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Ketentuan tentang pembentukan UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang

pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin, yang mana UPT Dinas Pendidikan berubah nama menjadi Satuan Pendidikan Formal.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap struktur susunan organisasi jabatan eselon maupun jabatan fungsional umum yang menjadi binaan dibawahnya dengan lingkup kerja binaan sebagai berikut :

Tabel 1.1

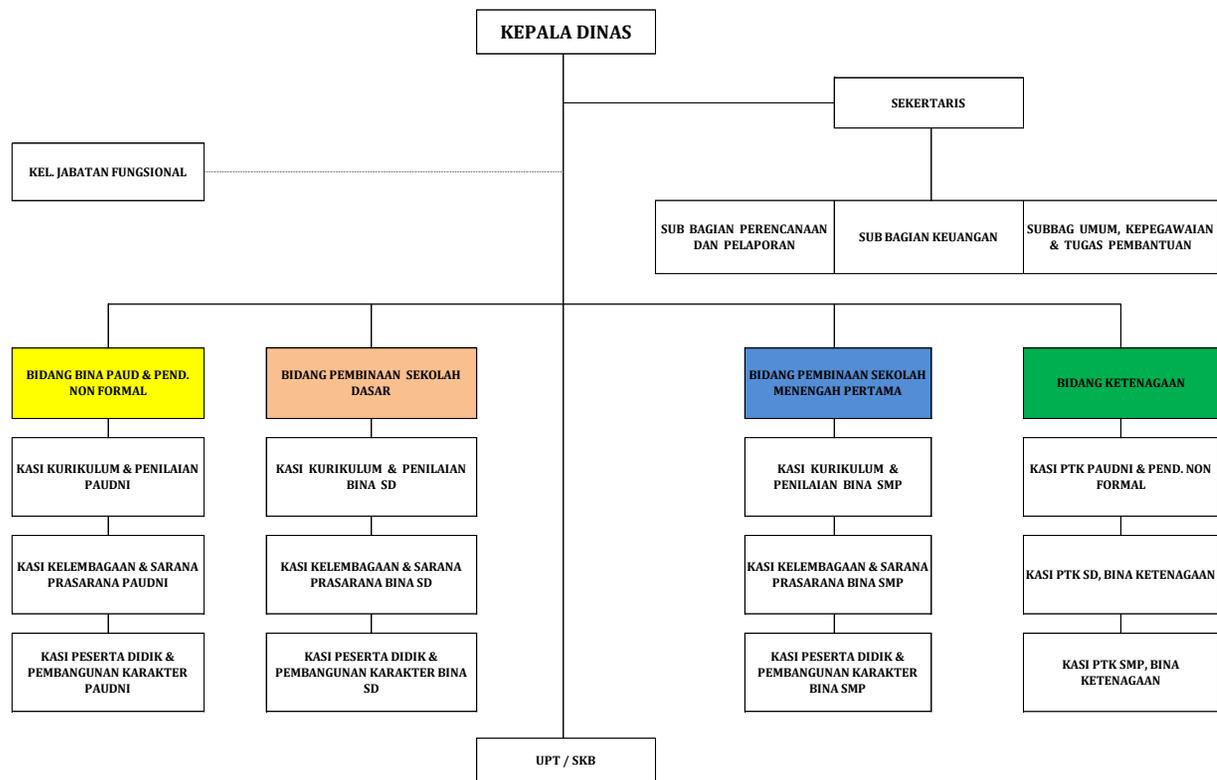
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

DATA JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

A	KEPALA DINAS		1
	1 KEPALA DINAS	1	
	JUMLAH	1	
B	SEKRETARIAT		19
	1. SEKRETARIS	1	
	2. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	1	
	3. SUB BAGIAN KEUANGAN	1	
	4. SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTUAN	1	
	5. KEPALA SKB	1	
	6. KEPALA TU SKB	1	
	7. STAF/ PENGADMINISTRASI SKB	13	
	JUMLAH	19	
C	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF		127
	1.KEPALA BIDANG BINA PAUD DAN PNF	1	
	2.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	3.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	4.SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKATER	1	
	5.JFT GURU TK	99	
	6. JFT PENGAWAS TK	4	
	7. JFT PAMONG BELAJAR	9	
	8. JFT PENILIK PLS	11	

	<i>JUMLAH</i>	<i>127</i>	
D	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR		1318
	1.KEPALA BIDANG BINA SD	1	
	2.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	3.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	4.SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKATER	1	
	5. JFT GURU SEKOLAH DASAR	1269	
	6. JFT PENGAWAS SD	14	
	7. JFU ADMINISTRASI SD	0	
	8 JFU PENJAGA SEKOLAH	31	
	<i>JUMLAH</i>	<i>1318</i>	
E	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		286
	1.KEPALA BIDANG BINA SMP	1	
	2.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	3.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	4.SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKATER	1	
	5. JFT PENGAWAS SMP	4	
	6.JFT GURU SMP	247	
	7. KEPALA TU SMP	12	
	8. JFU SMP	19	
	<i>JUMLAH</i>	<i>286</i>	
F	BIDANG KETENAGAAN		4
	1.KEPALA BIDANG KETENAGAAN	1	
	2.SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF	1	
	3.SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD	1	
	4.SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	1	
	<i>JUMLAH</i>	<i>4</i>	
	JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA DISDIK		1755

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN



Jika dilihat dari tabel 1.1 di atas tampak bahwa masih kekurangan tenaga jabatan fungsional umum yang hampir disemua bidang, namun walaupun demikian kinerja masih sesuai dengan apa yang diharapkan walaupun kadang dibawah target.

i. Permasalahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin yaitu sebagai berikut :

- (1) Koordinasi antar bidang belum optimal
- (2) Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang
- (3) Rendahnya hasil uji kompetensi guru
- (4) Penyebaran guru yang belum merata
- (5) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

ii. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis telaahan data dan fakta isu-isu strategis bidang pendidikan Kabupaten Tapin antara lain :

1. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak pada setiap jenjang dan tingkat pendidikan sesuai usianya.
2. Adanya keterbatasan akses sarana dan prasarana, media dan alat belajar, serta fasilitas penunjang lainnya Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ederajat).
3. Adanya halangan ekonomi bagi sebagian warga masyarakat terhadap biaya pendidikan anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD/Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat).
4. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, keahlian, kompetensi, kualifikasi dan sebaran geografis sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan sekolah Dasar (SD/Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat).
5. Belum optimalnya penerapan dan pengembangan Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar pelaksanaan, penilaian, pengelolaan, akreditasi dan penjaminan pada Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD/Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat).
6. Belum meratanya sebaran kualitas dan kuantitas mutu lulusan Pendidikan Dasar (SD/SMP/Sederajat) dalam persaingan tingkat lokal dan nasional.
7. Masih minimnya pembinaan terhadap prestasi siswa-siswa SD/SMP/Sederajat, dibidang saint, olah-raga maupun seni diajang kompetisi pelajar tingkat provinsi dan Nasional.
8. Belum optimalnya pengembangan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penguasaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan.
9. Terbatasnya akses dan perluasan budaya baca yang mudah, murah, dan merata sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
10. Rendahnya kontribusi bidang pendidikan terhadap peningkatan indikator-indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM).
11. Belum meratanya kapasitas pengetahuan, wawasan dan kemampuan yang dimiliki aparat pengelola perencana, pelaksana, serta pengendali program dan kegiatan bidang pendidikan.
12. Belum optimalnya penerapan, pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi secara luas, terpadu, selaras, transparan, akuntabel, dan efisien.
13. Belum optimalnya penerapan dan pengembangan sistem pengendalian intern (SPI) sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen (SPM) bagi terselenggaranya layanan prima pendidikan.
14. Terbatasnya pelaksanaan dan pengembangan promosi, dan advokasi bagi terselenggaranya layanan prima bidang pendidikan.

iii. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti disebutkan pada terdahulu, dinamika dan kinerja organisasi/lembaga Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan atau kondisi sektor pembangunan lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan.

Sistem pendidikan merupakan sistem terbuka yang keberadaannya mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan dengan sistem lainnya. Dinamika keberadaan dan peran sistem pendidikan tidak terlepas dari dinamika proses perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Faktor lingkungan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Faktor faktor lingkungan tersebut adalah demografi, geografi, sosial, budaya dan agama, ekonomi, politik, hankam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transportasi dan komunikasi. Jadi, pembangunan pendidikan dengan segala permasalahannya tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan masalah-masalah di luar sistem/sektor pendidikan. Pendidikan sebagai institusi masyarakat, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan lingkungannya. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat setempat.

Dengan memahami dan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap sektor pendidikan, maka setidaknya dalam proses penyelenggaraan pendidikan dapat dipahami pengaruh timbal balik antara faktor lingkungan dan pendidikan, dan mampu mengaplikasikan potensi faktor lingkungan secara optimal serta membantu pengembangan lingkungan. Dari sejumlah faktor lingkungan setidaknya terdapat tiga faktor lingkungan strategis yang menjadi fokus perhatian dan telaahan dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan, tahun 2018 yaitu :

a. Demografi

Pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kemandirian penduduk secara maksimal. Dengan demikian penduduk sebagai perorangan maupun sebagai kelompok merupakan sasaran kegiatan pendidikan. Oleh karenanya aspek-aspek kependudukan, dinamika dan masalahnya sangat mempengaruhi proses pembangunan pendidikan.

b. Geografi

Faktor geografis, seperti keadaan alam dan sumber daya alam dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan, baik yang bersifat menunjang maupun menghambat. Tersedianya sumber daya alam jelas merupakan faktor yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena pengelolaan sumber daya

alam yang optimal, efektif dan efisien akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tentu akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana pendidikan. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan antara lain, keadaan penduduk yang terpecah dan terpencil serta pemukiman yang padat khususnya dalam upaya perluasan dan pemerataan pendidikan.

c. Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan yang merupakan tumpuan harapan upaya peningkatan sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang berkualitas, dapat dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai Iptek yang sangat diperlukan guna mendukung pembangunan ekonomi dan sektor lainnya.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembuatan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

- TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- Inpres Nomor 7 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- SE Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja;
- Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/16/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan

1.3 Tindak lanjut Laporan Hasil evaluasi Tahun 2019

Tabel 1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2019

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Perencanaan Kinerja: a. Agar target kinerja dijadikan dasar reward dan punishment	a. Bappelitbang telah membuat mekanisme/SOP monitoring renstra secara periodik seperti terlampir pada dokumen. b. Tindak lanjut hasil monitoring renstra juga terdapat dalam lampiran ini. c. Rencana Aksi dipantau dan dievaluasi setiap periode triwulanan seperti terlampir.
2	Pengukuran Kinerja: a. Agar dibuat SOP tentang monitoring kinerja secara periodik serta dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring. b. Agar IKU dijadikan dasar reward dan punishment.	a. SOP tentang monitoring kinerja secara periodik telah ada dan terlampir. b. Bappelitbang melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan terus melakukan evaluasi triwulanan terhadap kinerja semua pegawai dan karyawan.
3	Pelaporan Kinerja: a. Agar menyajikan perbandingan data kinerja realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN	a. Penyajian perbandingan data kinerja realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN.
4	Evaluasi Internal:	

	a. Agar dibuat tindak lanjut hasil evaluasi program dan persetujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi program.	a. Hasil evaluasi program dan persetujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi program.
5	Pencapaian Kinerja: a. Agar dapat mempertahankan capaian kinerja yang sudah dicapai.	a. Mempertahankan capaian kinerja yang sudah dicapai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Sejalan dengan komitmen pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapin yang terangkum dalam *Visi “Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”*, dan *Misi Pertama “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing ”* yang kemudian diperjelas dengan *Tujuan 1.2 “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin”* selanjutnya dipertegas lagi kedalam) sasaran: a) *meningkatkan aksesabilitas dan kualitas pendidikan.*

Berangkat dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapin diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin menerjemahkannya kedalam, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan dalam memacu dan mempercepat pembangunan bidang pendidikan sesuai harapan.

Dinas pendidikan Kabupaten Tapin merupakan salah satu unsur SKPD Pemerintah Kabupaten Tapin yang melaksanakan urusan wajib dibidang Pendidikan, sehingga dalam melaksnakan tugas pokok dan fungsinya di kondisi untuk menopang dan menunjang keberhasilan Visi - Misi Pemerintah Kabupaten Tapin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga sekaligus keberhasilan Visi – Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan tersebut mengandung makna bahwa layanan pendidikan yang diselenggarakan di Kabuaten Tapin diharapkan nantinya dapat melahirkan masyarakat Tapin yang Cerdas, Trampil dan Agamis dan Berkarakter yakni Cerdas Spiritual, Cerdas Intelektual, Cerdas Emosional, Cerdas Sosial, Cerdas Kinestetis, dan memiliki kemampuan, potensi, dan aktualisasi diri untuk berkembang sesuai jenjang/tingkat pendidikan dan usianya. Serta berperilaku bernapaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju kearah hidup yang lebih baik.

Untuk dapat mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya menetapkan Misi antara lain :

1. Mewujudkan Meningkatkan *Ketersediaan* Layanan Pendidikan yang berkualitas secara merata.
2. Mewujudkan *Keterjangkauan* Layanan Pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan *Kualitas* / Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan sesuai Perkembangan kehidupan masyarakat, dan ilmu pengetahuan
4. Mewujudkan *Kesetaraan* dalam memperoleh Layanan Pendidikan berkualitas tanpa perbedaan.
5. Mewujudkan Pengembangan Pembelajaran yang Berorientasi Pada Pembentukan Karakter,
6. Meningkatkan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, Serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang pendidikan yaitu :

1. Peningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Perluasan Akses Pendidikan Sekolah Dasar yang Bermutu.
3. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat
4. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berorientasi pada pembentukan karakter
5. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat
6. Peningkatan Profesionalisme, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

Memasuki masa pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, berbagai kebijakan pembangunan pendidikan terus dilakukan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada kepentingan lokal daerah. Berbagai kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk mengatasi perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Dalam pendidikan diakui bahwa tingkat pendidikan dapat menjadi ukuran tingkat kemampuan berfikir seseorang, bahkan tingkat kemajuan suatu daerah dan negara sangat erat kaitannya dengan masalah mutu pendidikan yang

diselenggarakan. Sejalan dengan hal itu maka untuk terus memacu peningkatan mutu pendidikan diperlukan visi dan misidalam pembangunan pendidikan di daerah Kabupaten Tapin.

2. Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Adapun sasaran Jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis yakni Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya.

Adapun tingkat ketercapaian sasaran tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran adalah.

- 1) Meningkatnya Angka Partisipasi peserta didik PAUD.
 - 2) Meningkatnya mutu pelayanan PAUD dengan jumlah lembaga PAUD terakreditasi.
- b. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan strategis yakni Perluasan akses Pendidikan Sekolah Dasar yang bermutu.

Pendidikan Sekolah Dasar merupakan jembatan menuju pendidikan Sekolah menengah pertama, penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, harus disertai dengan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan menengah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan perluasan akses pendidikan sekolah dasar yang bermutu dengan tingkat ketercapaian sasaran berikut :

- 1) Meningkatnya Angka Partisipasi penduduk usia 7 - 12 dengan indikator kinerja
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A.
 - b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A.
- 2) Meningkatnya Angka Partisipasi penduduk usia 13 - 15 dengan indikator kinerja
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B.

- b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B
- c. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan strategis yakni Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,

Peningkatan mutu pembelajaran terutama dicirikan oleh penguatan pelaku pendidikan utamanya kompetensi siswa, peningkatan mutu pembelajaran didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis.

Adapun ciri dari tercapainya sasaran tersebut dengan indikator kinerja

- 1) Meningkatnya Rata-rata nilai ujian sekolah SD/MI
- 2) Meningkatnya rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs
- 3) Meningkatnya persentase kelulusan SD/MI /SMP/MTs
- 4) Meningkatnya persentase angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
- 5) Meningkatnya persentase angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
- 6) Meningkatnya persentase guru profesional (bersertifikasi)

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas Pendidikan dalam tabel 4.1 terlampir

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

RENSTRA										
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	PADA TAHUN KE-				
-1	-2	-3	-4			2019	2020	2021	2022	2023
RENSTRA 2018-2023										
	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah	7,53	7,54	7,91	8,3	8,72	9,15	9,61
			Harapan Lama Sekolah	11,52	11,85	12,1	12,7	13,34	13,74	14
		Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, DIKMAS Dan Pendidikan Dasar Jenjang SD/SMP	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	70,05	74,69	75,00	76,69	77,00	78,69	79,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103,08	106,15	106,25	106,50	106,75	107,00	107,05
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	87,84	93,95	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,32	91,65	91,96	92,06	93,24	94,88	96,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,42	79,06	79,50	80,00	80,15	80,45	81,00
		Meningkatnya Mutu Lulusan dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	87,61	86,99	87,25	87,85	88,54	89,45	90,00
			Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	91,86	91,87	91,91	91,96	92,01	92,06	92,11
			Rata-Rata Nilai Hasil US/UN SD/MI	68,70	62,03	63,64	64,28	65,92	66,56	67,00
			Rata-Rata Nilai Hasil US/UN SMP/MTs	61,04	53,58	60,90	61,08	62,70	63,60	64,00
			Persentase Angka Kelulusan SD/MI	99,43	97,64	98,54	98,65	99,76	99,87	99,98
			Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	98,72	100	100	100	100	100	100

			Persentase Guru yang Profesional (Bersertifikasi)	52,38%	53,76%	57,77 %	61,12%	64,48%	67,83 %	71,19%
RENSTRA										
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023										
	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah	7,53	7,54	7,91	8,3	8,72	9,15	9,61
			Harapan Lama Sekolah	11,52	11,85	12,1	12,7	13,34	13,74	14
		Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B				24,58	25,58	26,58	27,58
			Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B				28,57	29,57	30,57	31,57
			Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B				83,05	84,15	85,15	86,15
			Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B				97,15	97,20	97,25	100,00
			Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD				64,28	65,92	66,56	67,00
			Rata-Rata Nilai Hasil UN/US SMP				61,08	62,70	63,60	64,00
			Persentase Pendidik yang bersertifikat				61,12	64,48	67,83	71,19

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam dalam RPJMD dan RENSTRA suatu kerja perangkat daerah.

Dan Indikator kinerja utama menjadi dasar dalam penetapan Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja digunakan

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2020

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	Persentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B
		Persentase PNF dengan Akreditasi Minimal B
		Persentase SD dengan Akreditasi Minimal B
		Persentase SMP dengan Akreditasi Minimal B
		Rata-rata Nilai Hasil USBN SD
		Rata-rata Nilai Hasil UN SMP
		Persentase pendidik yang bersertifikat

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Struktur Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	1. Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	Jumlah PAUD yang terakreditasi minimal B _____ x 100 Jumlah Semua PAUD	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dapodik, BAN S/M Prov. Kalsel
		2. Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	Jumlah Lembaga PNF yang terakreditasi minimal B _____ x 100 Jumlah Semua Lembaga PNF	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dapodik, BAN S/M Prov. Kalsel
		3. Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi minimal B _____ x 100 Jumlah Semua Satuan Pendidikan SD	Bidang Pembinaan SD	Dapodik, BAN S/M Prov. Kalsel
		4. Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi minimal B _____ x 100 Jumlah Semua Satuan Pendidikan SMP	Bidang Pembinaan SMP	Dapodik, BAN S/M Prov. Kalsel

	5. Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD	$\frac{\text{Jumlah Rata - Rata USBN SD}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD}} \times 100$	Bidang Pembinaan SD	Hasil UASBN SD
	6. Rata-Rata Nilai Hasil UN SMP	$\frac{\text{Jumlah Rata - Rata UN SMP}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SMP}} \times 100$	Bidang Pembinaan SMP	Hasil UN SMP
	7. Persentase Pendidik yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Guru TK/SD/SMP bersertifikat}}{\text{Semua Jumlah Guru TK/SD/SMP}} \times 100$	Bidang Pembinaan Ketenagaan	Dapodik, Laporan Sekolah.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran

Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Esselon 2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	Persentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	24,58 %
			Persentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	28,57 %
			Persentase SD dengan Akreditasi Minimal B	83,05 %
			Persentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	97,15 %
			Rata-rata Nilai Hasil USBN SD	68,99 %
			Rata-rata Nilai Hasil UN SMP	49,02 %
			Persentase pendidik yang bersertifikat	59,01 %
2	Esselon 3 (Kepala Bidang Pembinaan	Meningkatnya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD	45%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
	PAUD & PNF)		Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen	75%
		Meningkatnya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Non Formal (PNF)	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF	30%
			Persentase PNF yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen	60%
		Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	85%
		Peningkatan Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	38,54%
		Peningkatan Jumlah lembaga PNF yang terakreditasi	Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	30,70%
		Meningkatnya Jumlah penduduk yang berusia 7-18 tahun yang mengikuti program pendidikan Non Formal	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang mengikuti program pendidikan non formal (%)	0,012 %
	Esselon 4 (Kasi Kelembagaan & Sarana Prasarana, Bina PAUD & PNF)	Tersedianya data sarana dan prasarana PAUD	Jumlah data sarana Prasarana PAUD yang telah diverifikasi.	85%
		Tersedianya data akses layanan pendidikan PAUD	Jumlah data akses layanan pendidikan PAUD yang telah diverifikasi.	179 Lembaga
		Pembinaan Akreditasi PAUD dan PNF	Jumlah PAUD yang di bina akreditasinya.	25 Lembaga
			Jumlah PNF yang di bina akreditasinya.	2 Lembaga
		Terpenuhinya sarana dan Prasarana lembaga Paud dengan kondisi baik	Jumlah lembaga yang dibangun.	76%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
		Tersedianya data dalam persiapan pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan PNF	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang akan diakreditasi sbb: PAUD, PKBM, LKP	25 Lembaga
		Melaksanakan pengawasan terhadap lembaga untuk pemenuhan standar nasional Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF	Jumlah lembaga dalam pengawasan : PAUD, PKBM, LKP	244 Lembaga
		Tersedianya lembaga PAUD dan PNF yang terakreditasi	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang terakreditasi	PAUD : 35 PNF : 2
		Melaksanakan verifikasi dan memberikan rekomendasi ke lembaga PAUD dan PKBM	Jumlah rekomendasi yang diberikan (rata-rata) PAUD, PKBM	10 dokumen
	Esselon 4 (Kasi Peserta Didik dan Pemb. Karakter Bina PAUD & PNF)	Terlaksananya Lomba Prestasi bagi peserta didik PAUD	Jumlah lomba prestasi PAUD yang dilaksanakan.	3 Lomba
		Terlaksananya pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang di bina PPDB.	179 Lembaga
		Pendataan PAUD yang mendapatkan Bantuan	Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan.	179 Lembaga
			Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan bantuan.	6.206 Siswa
		Terpenuhinya peserta didik pada jenjang PAUD dan PNF	Jumlah peserta didik pada jenjang PAUD dan PNF	PAUD : 7445 PNF : 1351
		Mengumpulkan dan menyiapkan data dalam rangka pelaksanaan BOP , KIP dan Anak Tidak Sekolah (DO)	Jumlah Lembaga yang menyingkron data pada aplikasi DAPODIK PAUD dan DIKMAS	PAUD : 162 PNF : 15
		Tersedianya lembaga PAUD dan PNF yang memenuhi syarat penerima BOP	Jumlah penerima BOP	PAUD : 162 PNF : 10
	Esselon 4 (Kasi Kurikulum & Penilaian	Tersedianya data hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini.	Jumlah data hasil belajar peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diverifikasi.	60%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
	Bina PAUD & PNF)	Ujicoba UN Paket A, Paket B, dan Paket C.	Jumlah Pendidikan Non Formal yang melaksanakan ujicoba UN Paket A, Paket B, dan Paket C.	-
		Terlaksananya UN Paket A, Paket B dan Paket C.	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti UN Paket A, Paket B, dan Paket C.	750 Peserta Didik
		Pelaksanaan Kurikulum 2013 di PAUD.	Jumlah PAUD yang melaksanakan kurikulum 2013.	145 Lembaga
		Terlaksananya Pembinaan PAUD dan PNF	Jumlah PAUD yang di bina.	179 Lembaga
			Jumlah PNF yang di bina.	13 Lembaga
3	Esselon 3 (Kepala Bidang Pembinaan SD)	Meningkatnya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SD	5,43%
			Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen	2,35%
	Esselon 4 (Kasi Kelembagaan & Sarana Prasarana, Bina SD)	Tersedianya data sarana dan prasarana SD	Jumlah data sarana Prasarana SD yang telah diverifikasi.	178 Sekolah
		Tersedianya data akses layanan pendidikan SD	Jumlah data akses layanan pendidikan SD yang telah diverifikasi.	178 Sekolah
		Pembinaan Akreditasi Sekolah Dasar	Jumlah SD yang di bina akreditasinya.	178 Sekolah
	Esselon 4 (Kasi Peserta Didik dan Pemb. Karakter Bina SD)	Terlaksananya Lomba Prestasi bagi Siswa SD	Jumlah lomba prestasi SD yang dilaksanakan.	4 Lomba
		Terlaksananya pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD	Jumlah SD yang di bina PPDB.	178 Sekolah
		Pendataan SD yang mendapatkan Bantuan	Jumlah SD yang mendapatkan bantuan.	176 Sekolah
			Jumlah siswa SD yang mendapatkan bantuan.	21.926 Siswa Bos :18.078

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
				PIP : 3.500 CSR : 176 Baznas: 162 BRI :
	Esselon 4 (Kasi Kurikulum & Penilaian Bidang Bina SD)	Tersedianya data hasil belajar Siswa SD	Jumlah data hasil belajar Siswa SD yang telah diverifikasi.	3300 Siswa
		Ujicoba USBN SD	Jumlah SD Yang Melaksanakan ujicoba USBN SD	175 Sekolah
		Terlaksananya USBN SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti USBN SD	3300 Siswa
		Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar	Jumlah SD yang melaksanakan kurikulum 2013.	178 Sekolah
		Terlaksananya Pembinaan Sekolah Dasar	Jumlah SD yang di bina.	178 Sekolah
4	Esselon 3 (Kepala Bidang Pembinaan SMP)	Meningkatnya pemenuhan Standar Nasional Sekolah Menengah Pertama SMP	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP	5,30%
			Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen	90%
	Esselon 4 (Kasi Kelembagaan & Sarana Prasarana, Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya data sarana dan prasarana SMP	Jumlah data sarana Prasarana SMP yang telah diverifikasi.	26 Sekolah
		Tersedianya data akses layanan pendidikan SMP	Jumlah data akses layanan pendidikan SMP yang telah diverifikasi.	26 Sekolah
		Pembinaan Akreditasi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang di bina akreditasinya.	26 Sekolah
	Esselon 4 (Kasi	Terlaksananya Lomba Prestasi bagi peserta didik SMP	Jumlah lomba prestasi SMP yang dilaksanakan.	5 Lomba

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
	Peserta Didik dan Pemb. Karakter Bidang Pembinaan SMP)	Terlaksananya pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP	Jumlah SMP yang di bina PPDB.	26 Sekolah
		Pendataan SMP yang mendapatkan Bantuan	Jumlah SMP yang mendapatkan bantuan.	26 Sekolah
			Jumlah siswa SMP yang mendapatkan bantuan.	4.143 Siswa
	Esselon 4 (Kasi Kurikulum & Penilaian Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya data hasil belajar Siswa SMP.	Jumlah data hasil belajar Siswa SMP yang telah Diverifikasi	100%
		Ujicoba UN SMP	Jumlah SMP yang melaksanakan ujicoba UN SMP	26 Sekolah
		Terlaksananya UN SMP	Jumlah Siswa yang mengikuti UN SMP	1.382 Siswa
		Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang melaksanakan kurikulum 2013.	26 Sekolah
		Terlaksananya Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang di bina.	26 Sekolah
5	Esselon 3 (Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan)	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.	Persentase Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.	81,36 %
			Persentase Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.	52,34 %
		Meningkatnya pemenuhan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan PAUD.	Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD minimal 80 persen.	80,74 %
			Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP minimal 80 persen.	94,01 %
			Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik	100 %

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
			pada PAUD minimal 80 persen.	
	Esselon 4 (Kasi PTK PAUD dan PNF Bina Ketenagaan)	Tersedianya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yang valid.	Jumlah laporan data PTK PAUD yang telah diverifikasi.	83%
		Tersedianya data Calon kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah PAUD yang valid.	Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah PAUD yang telah diverifikasi.	85%
		Tersedianya data Pemenuhan Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang valid.	Jumlah laporan data pemenuhan PTK PAUD yang telah diverifikasi.	88%
		Tersedianya data pendidik PAUD bersertifikat yang valid.	Jumlah laporan data pendidik PAUD bersertifikat yang telah diverifikasi.	88%
	Esselon 4 (Kasi PTK SD Pembinaan Ketenagaan)	Tersedianya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SD yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yang valid.	Jumlah laporan data PTK SD yang telah diverifikasi.	100%
		Tersedianya data Calon kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SD yang valid.	Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SD yang telah diverifikasi.	100%
		Tersedianya data Pemenuhan Pendidik dan tenaga kependidikan SD yang valid.	Jumlah laporan data pemenuhan PTK SD yang telah diverifikasi.	85%
		Tersedianya data pendidik SD bersertifikat yang valid.	Jumlah laporan data pendidik SD bersertifikat yang telah diverifikasi.	90%
	Esselon 4 (Kasi PTK SMP Bina Ketenagaan)	Tersedianya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yang valid.	Jumlah laporan data PTK SMP yang telah diverifikasi.	93%
		Tersedianya data Calon kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SMP yang valid	Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SMP yang telah diverifikasi	91 %

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
		Tersedianya data Pemenuhan Pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang valid	Jumlah laporan data pemenuhan PTK SMP yang telah diverifikasi	80%
		Tersedianya data pendidik SMP bersertifikat yang valid	Jumlah laporan data pendidik SMP bersertifikat yang telah diverifikasi	70%
		Pemenuhan peningkatan sertifikasi guru SMP melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Jumlah PTKSMP yang mengikuti PPG	1 orang Dana APBN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan, berkewajiban untuk melaporkan kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun anggaran 2020 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

1. ANALISIS TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Selain itu tidak semua

indikator sasaran dapat dicapai setiap tahun, hal ini berkaitan dengan dana dan jenis kegiatan yang dapat dikerjakan dalam tahun bersangkutan.

Indikator sasaran hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan atau hal-hal lain yang menimbulkan pencapaian indikator sasaran. Selain itu untuk dapat diukur, target indikator sasaran yang akan dicapai harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dimasukkan ke dalam rencana kinerja. Hasil pengukuran indikator sasaran akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu instansi dalam mencapai satu sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran tahun 2020 disusun atau diperoleh berdasarkan outcome dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam tahun bersangkutan.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah pada table sebagai berikut yang didasarkan perjanjian kinerja

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	6
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	24,58	25,69
		Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	28,57	21,42
		Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B	83,05	79,21
		Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	97,15	96,15

		Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD	68,99	68,23
		Rata-Rata Nilai Hasil UN SMP	49,02	78,91
		Persentase Pendidik yang bersertifikat	59,01	50,06

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan

a. Presentase Pendidikan Anak Usia Dini dengan Akreditasi Minimal B

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan amanat, bahwa “Pemerintah Mengusahakan dan Menyelenggarakan Satu Sistem Pendidikan Nasional yang Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta Akhlak Mulia dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa yang Diatur dengan Undang-Undang”. Untuk penjalankan amanat tersebut diatas, pemerintah telah mencanangkan Visi, Misi dan Nawacita negara yang merupakan acuan dasar dalam mengembangkan program-program di bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya untuk peningkatan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia, menunjang pembangunan bangsa mencapai masyarakat yang sejahtera.

Sistem Pendidikan Nasional sebagai tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya: UU RI No.20/2003) adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan acuan di dalam pengembangan program-program terkait dengan usaha peningkatan penjaminan mutu pendidikan.

Visi Kemendikbud adalah: “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini menekankan pentingnya lingkungan yang kondusif terhadap

pendidikan itu sendiri serta keterlibatan semua pihak yang berkepentingan untuk ikut serta dalam usaha mencapai pendidikan yang berkualitas, serta dapat menghasilkan insan cendikia yang diperlukan dalam membangun bangsa dengan masyarakat yang sejahtera.

Misi Kemendikbud adalah:

- a) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
- b) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;
- c) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
- d) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; dan
- e) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dasar tersebut, menetapkan bahwa program-program pendidikan dan kebudayaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Hal tersebut penting untuk menghadapi tantangan pembangunan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global yang menuntut dilakukannya pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Negara bertanggung jawab atas penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan untuk setiap jalur pendidikan yang saling melengkapi dan memperkaya serta dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka, yaitu:

- 1) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- 2) Pendidikan Nonformal yang diuraikan sebagai pendidikan sepanjang hayat yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dan berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional; dan

3) Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 4 ayat 6 pada UU RI No.20/2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, selain melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pendidikan nasional, mutu pendidikan dijadikan sebagai salah satu kebijakan pokok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut sejalan dengan isi pada BAB XVI Bagian II tentang Akreditasi pada pasal 60 ayat 1 dan 2 untuk menilai kelayakan program dalam satuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAN PAUD dan PNF melaksanakan akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Usaha pemerintah untuk mengembangkan SDM melalui satuan pendidikan PAUD dan PNF telah mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam rangka pemenuhan standar tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan satuan pendidikan untuk siap diakreditasi secara berkesinambungan dan terus-menerus dengan harapan proses akreditasi dapat meningkatkan kualitas satuan pendidikan.

Akreditasi PAUD dan PNF dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan atas dasar peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan setiap sasaran dan umumnya ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Instrumen akreditasi beserta kelengkapan operasionalnya disusun oleh BAN PAUD dan PNF. Instrumen akreditasi untuk penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF digunakan untuk evaluasi diri, setidaknya dapat mengukur standar kelayakan minimal. Hasil akreditasi ini merupakan acuan bagi pemerintah yang juga bertindak sebagai pembina untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan. Demikian juga perkembangan akreditasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan, seperti capaian pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Presentase Pendidikan Anak Usia Dini dengan Akreditasi Minimal B

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian
1	2	3	4
Presentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Akreditasi Minimal B	24,58%	25,68%	104,47%
Capaian Kinerja			104.47%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dapat tercapai melampaui target yang telah ditentukan dimana target yang diharapkan sebesar 24,58% terealisasi sebesar 25,68% atau dengan capaian kinerja sebesar 104,47%. Ketercapaian kinerja ini dipengaruhi oleh upaya dinas Pendidikan kabupaten Tapin melalui pendampingan akreditasi baik melalui forum IGTKI maupun Himpaudi Kabupaten Tapin untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya akreditase PAUD. Selain itu juga melakukan sosialisasi akreditasi sekolah yang bertujuan untuk membantu satuan pendidikan jenjang PAUD untuk mempersiapkan diri untuk kegiatan akreditasi dengan harapan bisa memperoleh nilai akreditasi yang baik.

b. Presentase Pendidikan Non Formal dengan Akreditasi Minimal B

Seperti diketahui Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. untuk mengembangkan SDM Usaha pemerintah melalui satuan pendidikan non formal (PNF) telah mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam rangka pemenuhan standar tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan satuan pendidikan untuk siap diakreditasi secara berkesinambungan dan terus-menerus dengan harapan proses akreditasi dapat meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Dan juga salah satu cara paling mudah untuk mengetahui mutu satuan pendidikan seperti mutu pendidikan non formal, lembaga kursus dapat dilihat dari status akreditasinya, semakin baik akreditasi suatu pendidikan berarti proses penjaminan mutunya semakin baik. Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk menghindari proses akreditasi bagi pendidikan non formal sebagai pertanggung jawaban dalam kaitannya dengan proses penjaminan mutu. Kemudian untuk perkembangan akreditasi pendidikan non formal dengan akreditasi minimal B yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Presentase Pendidikan Non Formal dengan Akreditasi Minimal B

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian
1	2	3	4
Presentase Pendidikan Non Formal (PNF) dengan Akreditase Minimal B	28,57%	21,43	75,01%
Capaian Kinerja			75,01%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian presentase pendidikan non formal dengan akreditasi minimal B hanya tercapai 21,43% dari target yang dikehendaki yaitu sebesar 28,57% atau dengan kata lain hanya 75,01% yang tercapai dari target. Tidak terealisasi target hal ini karena adanya penundaan pelaksanaan akreditasi di tahun ini di karenakan Pandemi Covid-19, sehingga ini akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

c. Presentase Sekolah Dasar (SD) dengan Akreditasi Minimal B

Akreditasi suatu proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan. Akreditasi dapat juga diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk beroperasi dan menyelenggarakan program-programnya. Proses Akreditasi Sekolah menyediakan sekolah dengan kerangka kerja yang komprehensif untuk terus meningkatkan prestasi siswa dan efektivitas sekolah.

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen regulasi diri, dengan maksud agar suatu Sekolah dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri; dan berdasarkan atas pemahaman kekuatan dan kelemahan diri tersebut, Sekolah dapat melakukan

perbaikan mutu secara berkelanjutan. Akreditasi juga dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu Sekolah/Madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sudut pandang ini, ada sekolah/madrasah yang terakreditasi dan tidak, dengan peringkat A, B, C dan seterusnya. Demikian halnya di kabupaten Tapin Sekolah Dasar dengan jumlah sekolah 175 sekolah negeri dan 3 sekolah swasta, dari 178 sekolah tersebut dengan klasifikasi akreditasi A sejumlah 10 sekolah, akreditasi B sebanyak 131, akreditasi C 30 sekolah, dan tidak terakreditasi 7 sekolah. Adapun capaian akreditasi sekolah dasar dengan akreditasi minimal B dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Presentase Sekolah Dasar (SD) dengan Akreditasi Minimal B

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian
1	2	3	4
Presentase Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan Akreditasi Minimal B	83,05%	79,21%	95,37%
Capaian Kinerja			95,37%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi presentase sekolah dasar dengan akreditasi minimal tercapai hanya 79,21 dari target 83,05% atau hanya tercapai 95,37%. Ketidak tercapaian target ini disebabkan karena adanya pengaruh pandemi Corona-19, yang secara langsung juga mempengaruhi anggaran pelaksanaan akreditasi oleh BAN propinsi Kalimantan Selatan, dari 28 sekolah dasar yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin untuk dilaksanakan akreditasi ditahun 2020, namun karena pengaruh pengurangan anggaran akhirnya hanya 3 sekolah yang dilaksanakan akreditasi dengan hasil ketiga sekolah tersebut mendapat akreditasi sekolah dengan klasifikasi B dan juga untuk pelaksanaan akreditasi visitasinya menggunakan metode daring.

d. Presentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan akreditasi Minimal B

Pelaksanaan akreditasi bukan dimaknai untuk mendapatkan nilai semata, tetapi harus dimaknai pula sebagai dasar pijakan perbaikan pengelolaan satuan pendidikan pasca pelaksanaan akreditasi. Nilai akreditasi pada dasarnya merupakan refleksi tentang sejauh mana satuan pendidikan telah dapat merealisasikan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Karena itu, kebijakan lanjutan pasca pelaksanaan visitasi adalah pelaksanaan penelaahan terhadap berbagai unsur dari SNP tersebut yang selanjutnya dijadikan dasar perbaikan pengelolaan satuan pendidikan.

Hasil akreditasi dari setiap satuan pendidikan, selayaknya dijadikan dasar perbaikan pengelolaan oleh setiap satuan pendidikan, Selanjutnya pula bahwa pelaksanaan akreditasi diharapkan dapat mendorong lahirnya pelayanan pendidikan berkualitas. Untuk itu, pelaksanaan visitasi akreditasi yang dilaksanakan oleh para assesor pun harus dilakukan dengan seobyektif mungkin dengan melihat fakta yang ada. Dengan demikian, dari pelaksanaan visitasi akan diperoleh dua hasil, yaitu nilai akreditasi dan potret mutu setiap satuan pendidikan.

Selanjutnya, bahwa pelaksanaan visitasi akreditasi harus menjadi stimulus bagi setiap sekolah/madrasah guna melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Hasil akreditasi menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Untuk mencapai kearah itu, dalam pelaksanaan visitasi akreditasi ini, dibutuhkan integritas dari pihak sekolah yang menjadi sasaran akreditasi dengan didukung pula oleh integritas dari setiap assesornya.

Visitasi akreditasi merupakan bentuk konfirmasi atas kebenaran dan keakuratan data evaluasi diri sekolah/madrasah yang sudah di-*in put* melalui Sispena dan DIA (data isian akreditasi). Sebelum melaksanakan visitasi, seluruh sekolah yang menjadi sasaran akreditasi telah menuangkan evaluasi diri masing-masing secara *on line* melalui aplikasi tersebut. Karena itu, penugasan assesor ini merupakan langkah konfirmasi atas data yang telah diisikan pada aplikasi oleh setiap sekolah. Namun untuk tahun 2020 ini pelaksanaan akreditasi untuk satuan

pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) tidak dapat dilaksanakan karena ada pengurangan anggaran pada BAN Provinsi Kalimantan Selatan akibat pandemi covid-19 dimana untuk tahun 2020 ini seharusnya 4 sekolah menengah pertama yang harus melaksanakan akreditasi dari 26 sekolah menengah pertama di Kabupaten Tapin. Dan juga pelaksanaan akreditasi pada sekolah menengah pertama ini karena masa akreditasi hanya berlaku 5 tahun maka perlu dilakukan lagi akreditasi terhadap sekolah-sekolah yang masa akreditasinya berakhir. Berikut capaian presentase sekolah menengah pertama seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Presentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Akreditasi Minimal B

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian
1	2	3	4
Presentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Akreditasi Minimal B	97,15%	96,15%	98,97%
Capaian Kinerja			98,97%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa presentase sekolah menengah pertama (SMP) dengan akreditasi minimal B terealisasi sebesar 96,15% dari target 97,15% atau dengan capaian sebesar 98,97%. Angka ini didapat dimana jumlah sekolah menengah pertama dengan akreditasi B sebanyak 25 sekolah dan 1 sekolah dengan akreditasi C, hal ini seperti dijelaskan di atas disebabkan karena pelaksanaan akreditasi untuk sekolah menengah pertama tidak bisa dilaksanakan karena pengaruh pandemi covid-19 yang menyebabkan pengurangan anggaran pada Badan Akreditasi Nasional (BAN Provinsi Kalimantan Selatan). Dan untuk meningkatkan akreditasi pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama ini adalah dengan mengusulkan sekolah untuk dilakukan akreditasi di tahun 2021 yang masa akreditasinya berakhir di tahun 2020 selain itu juga melakukan pendampingan akreditasi kepada sekolah yang menjadi sasaran di tahun 2021 oleh pengawas yang berpengalaman menjadi asesor akreditasi.

e. Rata - Rata nilai USBN SD

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Sekolah dasar pada tahun 2020 tidak dilaksanakan hal ini karena pengaruh pandemic covid-19 dan juga surat edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (covid-19). Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dinas pendidikan Kabupaten Tapin menerapkan kebijakan untuk menerapkan ujian sekolah mata pelajaran USBN SD untuk mengukur kompetensi pengetahuan siswa sebagai pelaksanaan dari standar kompetensi lulusan yang merupakan acuan utama dalam pengembangan standar nasional pendidikan, Berikut data capaian rata rata ujian sekolah pada satuan pendidikan sekolah dasar (SD) :

Tabel 3.6 Hasil rata-rata nilai Ujian Sekolah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian
Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI	64,28	68,23	106,14%
Capaian Kinerja			106,14%

Dilihat dari tabel di atas bahwa hasil rata-rata nilai hasil ujian nasional pada realisasi sebesar 68,23 lebih tinggi dari target yang direncanakan sebesar 64,28 sehingga capaian kinerja sebesar 106,14%. Pelaksanaan Ujian Nasional pada tahun 2020 ini ditiadakan. Dalam peningkatan nilai Ujian Nasional SD/MI ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin berupaya untuk meningkatkan nilai rata rata Ujian Sekolah SD yaitu upaya yang dilakukan menyelenggarakan bedah kisi – kisi melalui forum K3S maupun KKG di kecamatan kecamatan di Kabupaten Tapin dan menyelenggarakan try out ujian sekolah walaupun melalui

pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta menyelenggarakan Bimbingan teknis 3 mata pelajaran untuk kelas VI melalui forum KKG.

f. Hasil rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs

Sama seperti ujian nasional tingkat SD untuk jenjang SMP pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Menengah pertama pada tahun 2020 tidak dilaksanakan hal ini karena pengaruh pandemic covid-19 dan juga surat edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (covid-19). Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dinas pendidikan Kabupaten Tapin menerapkan kebijakan untuk menerapkan ujian sekolah mata pelajaran UNBK untuk mengukur kompetensi pengetahuan siswa sebagai pelaksanaan dari standar kompetensi lulusan yang merupakan acuan utama dalam pengembangan standar nasional pendidikan, Berikut data capaian rata rata ujian sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Tabel 3.7 Hasil rata-rata nilai Ujian Sekolah

Indikator Kinerja	Realisasi 2020
Rata-rata nilai Ujian Sekolah SMP	78,91

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian rata rata ujian sekolah pada satuan pendidikan menengah pertama dengan nilai rata rata sekolah yaitu 78,91, angka ini dihimpun dari sejumlah 26 sekolah SMP dikabupaten Tapin.

g. Persentase Pendidik yang bersertifikat

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan

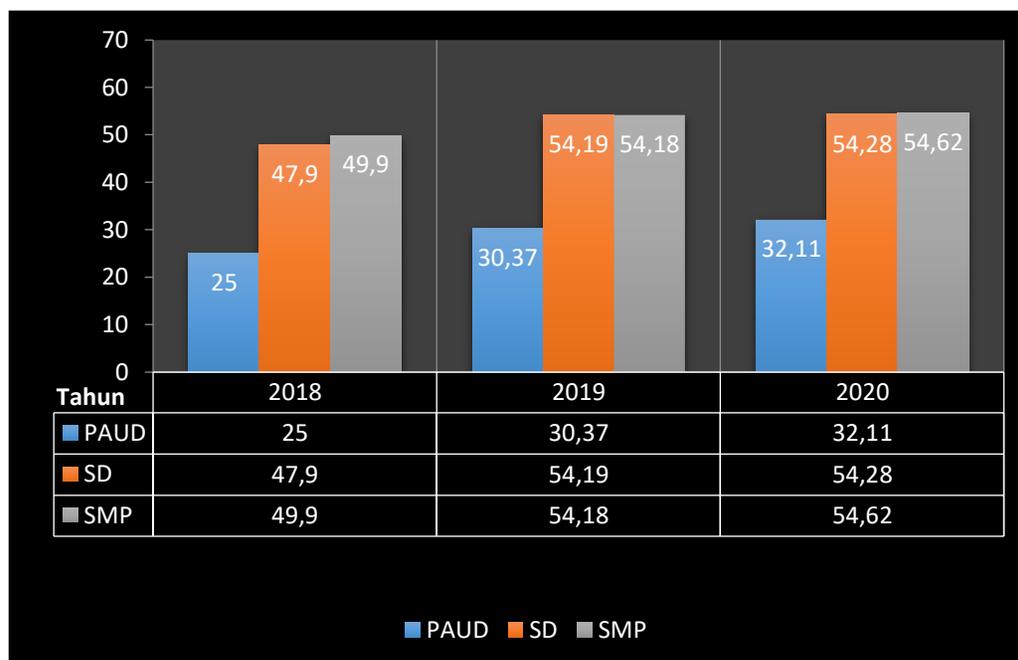
diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (bukan PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Demikian halnya di Kabupaten Tapin keadaan guru bersertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Keadaan Guru bersertifikasi

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian kinerja 2020
Persentase Guru professional (Bersertifikasi)	59,01%	50,06%	84,83%
Capaian Kinerja			84,83%

Dari tabel di atas menunjukkan, Guru/ tenaga pendidik yang professional atau bersertifikasi di dinas pendidikan kabupaten Tapin pada tahun 2020 mencapai 50,06 % dari target 59,01% atau dengan capaian kinerja sebesar 84,83%. Angka ini didapat dari guru PAUD yang bersertifikasi sebanyak 149 orang dari jumlah guru sebanyak 464 Orang dan jumlah guru sekolah dasar bersertifikasi sebanyak 861 orang dari jumlah guru SD sebanyak 1.586 orang serta guru SMP yang bersertifikasi sebanyak 195 dari total jumlah guru SMP 357 orang. Angka capaian pada tahun 2020 ini lebih tinggi dari tahun 2019 mencapai 48,63% dari target sebesar 57,77% dengan capaian kinerja sebesar 88,18%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah guru PAUD sebanyak 398, guru SD sebanyak 1480 dan guru SMP sebanyak 188 orang yang mempunyai sertifikat pendidik professional di bagi total jumlah guru PAUD, SD/dan SMP sebanyak 2225 orang, berikut grafik perkembangan guru bersertifikasi dikabupaten Tapin.

Grafik Perkembangan Guru Bersertifikasi Tahun 2020



Dari grafik diatas terlihat bahwa adanya kenaikan persentase guru yang bersertifikasi baik guru pada jenjang PAUD, SD dan SMP, untuk guru PAUD dengan capaian 32,11% dari 30,37% pada tahun 2019. Sedangkan pada guru bersertifikasi pada jenjang SD yaitu dengan capaian 47,9% pada tahun 2018 meningkat menjadi 54,19% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan menjadi 54,28 serta persentase guru bersertifikasi pada jenjang SMP ditahun 2018 sebesar 49,9% menjadi 54,19% dan pada tahun 2020 menjadi 54,62%. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat persentase guru bersertifikasi pada tahun 2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin ini mengalami peningkatan, peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkat jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru baik melalui beasiswa dari pemerintah daerah kabupaten tapin dan pemerintah pusat maupun PPG melalui biaya mandiri.

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Kinerja Tahun Anggaran 2020		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	24,58	25,69	104,51	Program Pendidikan Anak Usia Dini		675.300.000,00
		Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	28,57	21,42	74,97	Program Pendidikan Non Formal		891.367.900,00
		Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B	83,05	79,21	95,37	Program Pembinaan SD		13.344.789.700,00

		Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	97,15	96,15	98,97	Program Pembinaan SMP		9.138.203.000,00
		Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD	68,99	68,23	98,89	Program Pembinaan SD		13.344.789.700,00
		Rata-Rata Nilai Hasil UN SMP	49,02	78,91	160,97	Program Pembinaan SMP		9.138.203.000,00
		Persentase Pendidik yang bersertifikat	59,01	50,06	84,83	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan kependidikan		134.690.000,00

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2018

Tabel 3.10
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019 DAN TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
RENSTRA TAHUN 2018-2023							
Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, DIKMAS Dan Pendidikan Dasar Jenjang SD/SMP	Rata-Rata Lama Sekolah	100%	7,54	7,91	7,75	8,30	7,76
	Harapan Lama Sekolah		11,85	12,10	11,86	12,70	11,94
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		66,03	75,00	84,17	76,69	77,13
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		100,35	106,25	98,38	106,5	100,25
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		89,36	94,00	91,98	94,50	89,48
	Angka Partisipasi Murni (APM)		87,03	91,96	88,48	92,06	94,12

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
	SD/MI/Paket A						
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		72,87	79,50	66,61	80,00	64,38
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun		87,03	91,96	88,48	92,06	94,12
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun		72,87	79,50	66,61	80,00	64,38
Meningkatnya Mutu Lulusan dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs		87	87,25	93,93	87,85	82,20
	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/S MK		91,87	91,91	84,78	91,96	81,32
	Rata-Rata Nilai Hasil		62,03	63,64	67,51	64,28	68,23

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
	US/UN SD/MI						
	Rata-Rata Nilai Hasil US/UN SMP/MTs		53,58	60,90	48,88	61,08	78,91 (TIDAK BISA MENGUKUR MTs)
	Persentase Angka Kelulusan SD/MI		97,64	98,54	100	98,65	99,82
	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs		100	100	100	100	99,99
	Persentase Guru yang Profesional (Bersertifikasi)		53,76%	57,77%	48,63	59,01	50,06
	Persentase program prioritas yang terakomodir dalam RPJMD	100%	100%	100%	100%		
	Persentase pencapaian tujuan dan sasaran strategis	100%	100%	100%	100%		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
	pembangunan daerah						
PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023							
Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B					24,58	25,69
	Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B					28,57	21,42
	Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B					83,05	79,21
	Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B					97,15	96,15
	Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD		62,03	63,64	67,51	68,99	68,23

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
	Rata-Rata Nilai Hasil UN SMP		53,58	60,90	48,88	49,02	78,91
	Persentase Pendidik yang bersertifikat		53,76	57,77	48,63	59,01	50,06

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 untuk Indikator Kinerja Utama persentasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan akreditasi minimal B mendapat capaian sebesar 25,68%. Sedangkan pada tahun 2019 dengan capaian 25,60%, angka ini diperoleh dari jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mempunyai nilai akreditasi A dan B sebanyak 47 sekolah dibagi jumlah keseluruhan lembaga PAUD yaitu 183 lembaga dikali 100. Untuk pelaksanaan akreditasi tahun 2020 tidak dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF karena pandemi Covid-19.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama persentasi Pendidikan Non Formal (PNF) dengan akreditasi minimal B, pada tahun 2020 sebesar 21,43% dan ini sama dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 21,43%. Capaian ini sama karena pada tahun 2020 tidak ada sasaran akreditasi.

Kemudian Indikator Kinerja Utama persentasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan akreditasi minimal B pada tahun 2020 mendapat capaian kinerja dengan angka 79,21%, sedangkan tahun 2019 sebesar 79,66% dan pada tahun 2018 82,25%. Dari capaian tersebut ada

penurunan, dimana penurunan ini dipengaruhi jumlah sekolah yang bertambah pada tahun 2020 sebanyak 178 Sekolah Dasar (SD), tahun 2019 sebanyak 177 Sekolah Dasar (SD). Dan pada tahun 2018 sebanyak 176 Sekolah Dasar (SD), selain itu penurunan ini dipengaruhi oleh jumlah sasaran akreditasi dimana pada tahun 2020 hanya 3 sekolah yang menjadi sasaran akreditasi dan pada tahun pada tahun 2019 hanya 8 sekolah yang menjadi sasaran akreditasi.

Selanjutnya untuk Indikator Kinerja Utama persentasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan akreditasi minimal B pada tahun 2020 dengan capaian 96,15%, pada tahun 2019 dengan capaian 96,15% sedangkan pada tahun 2018 dengan capaian 57,69%. Capaian pada tahun 2020 dan 2019 ini sama karena pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena pengaruh dari pandemi Covid-19. Capaian kinerja tahun 2019-2020 ini lebih tinggi dari tahun 2018 dimana pada tahun 2018 satuan Pendidikan SMP dengan akreditasi B hanya berjumlah 15 sekolah, sedangkan tahun 2019 dan 2020 satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B sebanyak 25 sekolah dari jumlah 26 sekolah satuan Pendidikan SMP.

Untuk Indikator Kinerja Utama rata-rata Ujian Nasional SD mendapat capaian 68,23 lebih tinggi dari capaian tahun 2019 dengan rata-rata 67,51 dan pada tahun 2018 dengan rata-rata 62,03. Dalam peningkatan nilai Ujian Nasional SD ini Dinas Pendidikan Kab.Tapin berupaya untuk meningkatkan nilai rata-rata US SD yaitu upaya yang dilakukan menyelenggarakan bedah kisi-kisi soal UN melalui Forum K3S maupun KKG di kecamatan-kecamatan di Kab.Tapin dan menyelenggarakan try out UN serta menyelenggarakan Bimtek 3 mata pelajaran untuk kelas VI melalui Forum KKG.

Dan Indikator Kinerja Utama rata-rata nilai UN SMP pada tahun 2020 mendapat capaian rata-rata 78,91. Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian tahun 2019 dengan nilai 48,80 dan pada tahun 2018 dengan nilai 53,58. Penurunan angka rata-rata UN SMP di tahun 2019 dengan nilai rata-rata 48,80 dipengaruhi oleh antaranya bobot soal dengan standar yang lebih tinggi, dan juga adanya perubahan pelaksanaan ujian nasional dari ujian nasional berbasis kertas pensil (UNKP) ke ujian nasional berbasis

komputer (UNBK) serta banyaknya sekolah di Kab.Tapin yang melaksanakan UNBK menggabung ke sekolah lain, kemudian yang lebih berpengaruh lagi yaitu siswa tidak atau belum terbiasa mengerjakan soal ujian nasional berbasis komputer (UNBK) waktu mengerjakan soal terus terpampang di layar monitor sehingga hal ini membuat siswa menjadi gugup, serta adanya peserta ujian yang tidak hadir pada saat berlangsungnya UNBK terutama siswa-siswi dari SMP terbuka walaupun ujian susulan ada.

Pada tahun 2020 ini Kemendikbud memutuskan untuk membatalkan ujian nasional karena pengaruh pandemi Covid-19 dengan tujuan demi keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya.

Melalui surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa Darurat Corona Discase (Covid-19) sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa

Adapun syarat kelulusan SD dan SMP dan SMP/Sederajat :

- Kelulusan Sekolah Dasar/Sederajat dan SMP/Sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima (5) semester terakhir.
- Nilai semester genap kelas 6 dan kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Selanjutnya untuk Indikator persentasi pendidik yang bersertifikasi pada tahun 2020 mendapatkan capaian 50,06% dan pada tahun 2019 dengan capaian 48,63% serta pada tahun 2018 dengan capaian 53,76% dari penjabaran tersebut terlihat bahwa persentasi pendidik yang bersertifikat ada peningkatan tahun 2020 dari tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) baik melalui Dana APBD Kabupaten Tapin maupun APBN. Dengan peningkatan jumlah guru bersertifikasi di Dinas Pendidikan Kab.Tapin maka secara umum dapat membantu meningkatkan kualitas mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Peningkatan mutu dan kualitas

pendidikan perlu terus ditingkatkan dalam hal aspek kualitas SDM nya, hal ini akan berpengaruh pada peningkatan akreditasi sekolah yang didapat.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.11
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN
TARGET JANGKA MENENGAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2020	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	5	6
Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	24,58	24,58	25,69
	Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	28,57	28,57	21,42
	Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B	83,05	83,05	79,21
	Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	97,15	97,15	96,15

	Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD	68,99	68,99	68,23
	Rata-Rata Nilai Hasil UN SMP	49,02	49,02	78,91
	Persentase Pendidik yang bersertifikat	59,01	59,01	50,06

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dalam menggambarkan mengenai tingkat kinerja pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dengan standar Nasional. Dinas Pendidikan harus mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Dari hasil pengukuran kinerja dapat dikatakan bahwa selama tahun 2020 hasil capaian 7 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan.

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	TARGET RENSTRA KEMENDIKBUD 2015-2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	TARGET RENSTRA KEMENDIKBUD 2020-2024
1	2	3	4	5	6
1	Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	25,69%	Jumlah nasional 42.926 lembaga	25,69%	Jumlah nasional 5000 lembaga
	Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	21,42%	13%	21,42%	5000 lembaga
	Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B	79,66%	84,2%	79,21%	5000 lembaga
	Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	96,15%	81%	96,15%	5000 lembaga
	Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD	67,51	65	68,23	100
	Rata-Rata Nilai Hasil UN SMP	48,88	65	78,91	100
	Persentase Pendidik yang bersertifikat	48,63%	-	50,06%	47,43%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kab.Tapin dibanding target nasional seperti persentasi PAUD

dengan akreditasi minimal B, di mana target renstra di tahun 2019 menjelaskan output sasaran nasional sebanyak 42.926 lembaga yang termasuk di dalamnya sasaran akreditasi PNF dan pada tahun 2020 jumlah sasaran nasional 5000 lembaga PAUD dan PNF, sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama persentasi SD dengan akreditasi minimal B pada tahun 2019 sebesar 79,66%. Sedangkan target akreditasi nasional 84,2% dan pada tahun 2020 target Renstra Kemendikbud 2020 hanya menjelaskan output dari persentasi satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu 5000 lembaga. Demikian juga halnya dengan persentasi SMP dengan minimal B.

Kemudian untuk Indikator Kinerja Utama rata-rata hasil USBN SD dimana pada tahun 2019 mendapat capaian rata-rata 65 dan untuk rata-rata UN SMP 44,88 lebih rendah dari target nasional UN SMP yaitu rata-rata sebesar 55. Sedangkan pada tahun 2020 rata-rata hasil USBN SD sebesar 68,23 dan UN SMP sebesar 78,91 sementara target nasional hanya mengacu pada output persentasi satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakter melalui asesmen nasional berstandar jenjang SD dan SMP sebanyak 100%.

Dan untuk Indikator Kinerja Utama persentasi pendidik bersertifikat pada tahun 2019 mendapat capaian 48,63 dan pada tahun 2020 sebesar 50,06. Sedangkan target Renstra Kemendikbud pada tahun 2019 ada pemilahan guru bersertifikasi sesuai jenjang seperti PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK. Sementara pada tahun 2020 target Renstra Kemendikbud 47,43. Sedangkan capaian indikator kinerja utama persentasi pendidik yang bersertifikat sebesar 50,06 lebih besar dari target nasional 47,43.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif

Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2020 hasil capaian 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Pendidikan Non Formal
- c. Program Pembinaan Sekolah Dasar
- d. Program Pembinaan Sekolah Menengah
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin selama 1 (satu) tahun (bulan Januari 2020 hingga Desember 2020), terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Belum meratanya pengetahuan, wawasan dan kemampuan yang dimiliki pengelola kegiatan (PPTK) terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.
2. Belum dimilikinya tenaga yang berlatar-belakang pendidikan teknik Konstruksi.
3. Kurangnya tenaga yang memiliki kompetensi dasar pengadaan barang/jasa (bersertifikasi).
4. Kurangnya SDM /Pegawai Dinas Pendidikan terutama staf operator komputer.

5. Relatif masih rendahnya kapasitas dan kompetensi perencana, pengelola dan pengendali program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.
6. Masih kurangnya anggaran dan ragam program kegiatan dalam rangka pembangunan bidang pendidikan.
7. Belum optimalnya pengembangan dan pemamfaatan aplikasi sistem informasi manajemen pendidikan berbasis sekolah.
8. Terlambat terbitnya peraturan dan atau petunjuk teknis kegiatan yang berisi prosedur dan mekanisme kegiatan.
9. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kemendikbud RI dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan program dan kegiatan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan - permasalahan tersebut diatas beberapa upaya telah dilaksanakan antara lain :

1. Pemberdayaan tenaga yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan mengelola kegiatan sambil melakukan pembinaan dan pembimbingan ataupun pendampingan terhadap tenaga yang belum siap.
2. Telah melakukan permohonan tambahan tenaga yang berlatar-belakang pendidikan dan pengalaman kerja dibidang teknis konstruksi bangunan, tetapi belum dikabulkan.
3. Meminta tenaga yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pada SKPD lain dengan sambil terus mengikut sertakan tenaga yang ada untuk mengikuti uji sertifikasi pengadaan barang/jasa.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi perencana, pengelola dan pengendali program dan kegiatan bidang pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan diberbagai kesempatan.
5. Optimalisasi anggaran dan rasionalisasi pengembangan program dan kegiatan sesuai kemampuan keuangan daerah.
6. Pemamfaatan data dan informasi yang akurat, valid dan up to date dalam setiap program dan kegiatan.

7. Menjadwal ulang kegiatan untuk disesuaikan dengan kondisi reil dan lebih memacu pengelola kegiatan agar lebih pro-aktif dalam pengelolaan kegiatan.
8. Lebih meningkatkan koordinasi dengan konsultasi secara berkala baik yang bersifat rutin ataupun insidental dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kemendikbud RI melalui surat ataupun perjalanan dinas.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Sumber daya manusia (SDM)

DATA JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

A	KEPALA DINAS		1
	1 KEPALA DINAS	1	
	JUMLAH	1	
B	SEKRETARIAT		19
	1. SEKRETARIS	1	
	2. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	1	
	3. SUB BAGIAN KEUANGAN	1	
	4. SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTUAN	1	
	5. KEPALA SKB	1	
	6. KEPALA TU SKB	1	
	7. STAF/ PENGADMINISTRASI SKB	13	
	JUMLAH	19	
C	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF		127
	3.KEPALA BIDANG BINA PAUD DAN PNF	1	
	4.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	5.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	6.SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKATER	1	
	7.JFT GURU TK	99	
	8. JFT PENGAWAS TK	4	
	7. JFT PAMONG BELAJAR	9	
	8. JFT PENILIK PLS	11	
	JUMLAH	127	
D	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR		1318
	2.KEPALA BIDANG BINA SD	1	
	5.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	6.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	

	7. SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKATER	1	
	5. JFT GURU SEKOLAH DASAR	1269	
	6. JFT PENGAWAS SD	14	
	7. JFU ADMINISTRASI SD	0	
	8 JFU PENJAGA SEKOLAH	31	
	JUMLAH	1318	
E	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		286
	5. KEPALA BIDANG BINA SMP	1	
	6. SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	7. SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	8. SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKATER	1	
	5. JFT PENGAWAS SMP	4	
	6. JFT GURU SMP	247	
	7. KEPALA TU SMP	12	
	8. JFU SMP	19	
	JUMLAH	286	
F	BIDANG KETENAGAAN		4
	5. KEPALA BIDANG KETENAGAAN	1	
	6. SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF	1	
	7. SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD	1	
	8. SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	1	
	JUMLAH	4	
	JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA DISDIK		1755

Jika dilihat dari tabel 1.1 di atas tampak bahwa masih kekurangan tenaga jabatan fungsional umum yang hampir disemua bidang, namun walaupun demikian kinerja masih sesuai dengan apa yang diharapkan walaupun kadang dibawah target.

Kemudian Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, serta BAN S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) dan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan kegiatan.

b. Sarana dan Prasarana.

Ketersediaan sarana dan prasarana pada Bappelitbang sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berbanding lurus dengan adanya anggaran untuk perawatan sarana dan prasarana tersebut.

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.062.806.730,- dan terserap sebesar 5.110.291.604,- (84,29%) terdapat efisiensi dalam serapannya sebesar Rp. 952.515.126,- atau 15,71%

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Program pada Dinas Pendidikan

1. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

Unit Organisasi : Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas

Pendidikan

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD 	43%	45%	45%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen 	74%	75%	75%
2	Meningkatnya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Non Formal (PNF)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF 	28%	30%	30%

		<ul style="list-style-type: none"> Persentase PNF yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen 	58%	60%	60%
3	Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik 	74,00 %	85,00 %	85%
4	Peningkatan Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi 	45,00 %	38,54%	38,54%
5	Peningkatan Jumlah lembaga PNF yang terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentasi lembaga PNF yang terakreditasi 	21,42%	21,42%	30,70%
6	Meningkatnya Jumlah penduduk yang berusia 7-18 tahun yang mengikuti program pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang mengikuti program pendidikan non formal (%) 	0,0053%	0,012%	0,012 %

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidik tahun 2020 Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD dengan target 45% sudah terlaksana sepenuhnya, persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen dengan target 75% sudah dapat terlaksana dengan melakukan beberapa pembinaan baik pembinaan secara internal dan eksternal. Begitu pula pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Non Formal (PNF) dengan target 30% dapat terlaksana sepenuhnya serta pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen dengan target 60% juga dapat terlaksana dengan melakukan beberapa pendekatan dan peran aktif Penilik PNF yang secara berkala melakukan pembinaan dan pengawasan ke lapangan.

Sedangkan untuk Akreditasi baik itu akreditasi PAUD yang di target kan sebesar 24,58% serta Akreditasi PNF sebesar 28,57% tidak dapat terrealisasi hal ini tidak bukan karena adanya penundaan pelaksanaan akreditasi di tahun ini di karenakan Pandemi Covid-19, sehingga ini akan dilaksanakan di tahun yang akan datang. Kemudian untuk Jumlah penduduk yang berusia 7-18 tahun yang

mengikuti program pendidikan Non Formal nampak meningkat terlihat dari persentase warga negara usia 7-18 tahun yang mengikuti program pendidikan non formal dari tahun sebelumnya yaitu 0,0053 % ditahun ini menjadi 0,012% sesuai dengan apa yang sudah di targetkan, dimungkinkan karena masyarakat sudah mulai begitu menyadari akan pentingnya pendidikan, sehingga mereka sangat antusias menyambung pendidikan mereka melalui jalur Non Formal.

Unit Kerja : Kasi Kelembagaan & Sarana Prasarana, Bina PAUD
& PNF

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya data sarana dan prasarana PAUD	Jumlah data sarana Prasarana PAUD yang telah diverifikasi.	76%	85%	85%
2	Tersedianya data akses layanan pendidikan PAUD	Jumlah data akses layanan pendidikan PAUD yang telah diverifikasi.	100%	100%	179 Lembaga
3	Pembinaan Akreditasi PAUD dan PNF	- Jumlah PAUD yang di bina akreditasinya.	100%	100%	25 Lembaga
		- Jumlah PNF yang di bina akreditasinya.	100%	100%	2 Lembaga
4	Terpenuhinya sarana dan Prasarana lembaga Paud dengan kondisi baik	Jumlah lembaga yang dibangun.	100%	100%	76%
5	Tersedianya data dalam persiapan pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan PNF	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang akan diakreditasi sbb: PAUD, PKBM, LKP	100%	100%	25 Lembaga

6	Melaksanakan pengawasan terhadap lembaga untuk pemenuhan standar nasional Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF	Jumlah lembaga dalam pengawasan : PAUD, PKBM, LKP	100%	100%	244 Lembaga
7	Tersedianya lembaga PAUD dan PNF yang terakreditasi	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang terakreditasi	38,54% 21,42%	38,54% 21,42%	PAUD : 35 PNF : 2
8	Melaksanakan verifikasi dan memberikan rekomendasi ke lembaga PAUD dan PKBM	Jumlah rekomendasi yang di berikan (rata-rata) PAUD, PKBM	100%	100%	10 dokumen

Pada tahun 2020 penyediaan data sarana dan prasarana PAUD yang telah diverifikasi dengan target 85% dapat dilaksanakan sepenuhnya, begitupun untuk data akses layanan pendidikan PAUD yang telah diverifikasi sebanyak 179 Lembaga dapat terlaksana sepenuhnya.

Sedangkan untuk Pembinaan Akreditasi PAUD dan PNF sebanyak 25 Lembaga PAUD dan 2 Lembaga PNF dapat di bina seluruhnya untuk persiapan tahun yang akan datang.

Sarana dan Prasarana lembaga Paud dengan kondisi baik/ lembaga yang dibangun/dilakukan rehab di targetkan 76 %, dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Untuk penyediaan data dalam persiapan pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan PNF tersedia untuk 25 Lembaga yang memang dipersiapkan untuk pelaksanaan akreditasi, walupun ditahun ini pelaksanaan akreditasi mengalami penundaan diakibatkan pandemi, namun persiapan ini tetap kita laksanakan untuk akreditasi di tahun depan.

Melaksanakan pengawasan terhadap lembaga untuk pemenuhan standar nasional Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF kepada seluruh lembaga PAUD dan PNF yaitu sebanyak 244 Lembaga sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun ini walaupun dengan teknis yang berbeda dikarenakan pandemi ini.

Untuk Akreditasi lembaga PAUD dan PNF di tahun ini tidak dapat direalisasikan dikarenakan pelaksanaan akreditasi yang mengalami penundaan dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Sedangkan untuk kegiatan verifikasi dan pemberian rekomendasi ke lembaga PAUD dan PKBM tetap dilaksanakan dalam rangka pembaharuan izin operasional lembaga PAUD dan PNF.

Unit Kerja : Kasi Peserta Didik dan Pemb. Karakter Bina PAUD & PNF

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Lomba Prestasi bagi peserta didik PAUD	Jumlah lomba prestasi PAUD yang dilaksanakan.	6 Lomba	-	3 Lomba
2	Terlaksananya pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang di bina PPDB.	100%	100%	179 Lembaga
3	Pendataan PAUD yang mendapatkan Bantuan	- Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan.	100%	100%	179 Lembaga
		- Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan bantuan.	100%	100%	6.206 Siswa
4	Terpenuhinya peserta didik pada jenjang PAUD dan PNF	Jumlah peserta didik pada jenjang PAUD dan PNF	100%	100%	PAUD : 7445 PNF : 1351
5	Mengumpulkan dan menyiapkan data dalam rangka pelaksanaan	Jumlah Lembaga yang menyingkron data pada aplikasi	100%	100%	PAUD : 162

	BOP , KIP dan Anak Tidak Sekolah (DO)	DAPODIK PAUD dan DIKMAS			PNF : 15
6	Tersedianya lembaga PAUD dan PNF yang memenuhi syarat penerima BOP	Jumlah penerima BOP	100%	100%	PAUD : 162 PNF : 10

Lomba Prestasi bagi peserta didik PAUD pada tahun ini ditargetkan 3 Lomba namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan untuk pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang PAUD sepenuhnya dapat dilaksanakan kepada 179 lembaga PAUD walaupun dengan teknis yang berbeda di saat pandemi Covid-19 pada tahun ini.

Sebanyak 179 Lembaga PAUD terdata mendapatkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD dengan jumlah siswa PAUD sebanyak 6.206 siswa, semua dapat terelaisasi sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan.

Pengumpulan dan menyiapkan data dalam rangka pelaksanaan BOP, KIP dan Anak Tidak Sekolah (DO) dapat dilaksanakan sepenuhnya dimana untuk jumlah siswa PAUD sebanyak 6.261, dan untuk Warga Belajar Pendidikan Non Formal sebanyak 2.921 siswa.

Sebanyak 179 lembaga PAUD sudah melakukan sinkronisasi di semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021 begitu pula untuk PNF baik itu yang swasta maupun Negeri sebanyak 14 Lembaga PNF sudah melaksanakan sinkronisasi. Sedangkan untuk pemenuhan syarat untuk mendapatkan BOP semua lembaga PNF mendapatkan bantuan sedangkan untuk lembaga PAUD ada beberapa lembaga yang tidak dapat bantuan di karenakan tidak memenuhi syarat jumlah siswa yang ada di lembaganya, yaitu paling sedikit memiliki 9 siswa.

Unit Kerja : Kasi Kurikulum & Penilaian Bina PAUD & PNF
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya data hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini.	Jumlah data hasil belajar peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diverifikasi.	68%	75%	60%
2	Ujicoba UN Paket A, Paket B, dan Paket C.	Jumlah Pendidikan Non Formal yang melaksanakan ujicoba UN Paket A, Paket B, dan Paket C.	100%	-	-
3	Terlaksananya UN Paket A, Paket B dan Paket C.	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti UN Paket A, Paket B, dan Paket C.	100%	-	750 Peserta Didik
4	Pelaksanaan Kurikulum 2013 di PAUD.	Jumlah PAUD yang melaksanakan kurikulum 2013.	90%	100%	145 Lembaga
5	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan PNF	- Jumlah PAUD yang di bina.	100%	100%	179 Lembaga
		- Jumlah PNF yang di bina.	100%	100%	13 Lembaga

Data hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini yang ditergetkan 60% dapat dilaksanakan sepenuhnya pada tahun ini walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19 walaupun dengan mekanisme yg berbeda dan sebanyak 60% tersebut sudah dilakukan verifikasi.

Untuk Tryout/Ujicoba UN Paket A, Paket B, dan Paket C tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga pengnggaran untuk kegiatan banyak di alihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut.

Sehingga pelaksanaan UN Paket A, Paket B dan Paket C itu sendiri ditiadakan oleh pemerintah pusat, jadi untuk UN tidak dilaksanakan namun

Warga Belajar Paket A, B dan C tetap melaksanakan Ujian Akhir Sekolah untuk kelulusan mereka yg ditetapkan oleh lembaga masing-masing. Jumlah Peserta Didik / Warga Belajar yang mengikuti Ujian Akhir tersebut di target kan sebanyak 750 Peserta Didik baik Paket A, B dan C adalah 772 Warga Belajar.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di PAUD ditarget kan sebanyak 145 Lembaga, dilapangan sudah dilaksanakan oleh 179 lembaga PAUD itu dikarenakan di tahun 2020 ini semua lembaga paud sudah diwajibkan untuk melaksanakan kurikulum 2013.

Untuk itu maka dilakukan lah Pembinaan PAUD dan juga PNF terkait hal ini di mana sebanyak 179 lembaga PAUD yang di targetkan untuk dibina semua sudah mendapatkan pembinaan dan begitu pula untuk 14 Lembaga PNF semuanya dapat dilakukan pembinaan juga.

Sehingga pelaksanaan Pembelajaran sesuai kurikulum yang dilakukan oleh lembaga yang di targetkan sebanyak 50 lembaga dapat terlaksana sepenuhnya, hasil dari pembinaan yang sudah dilaksanakan tersebut. Serta dalam hal Tersedianya layanan yang bermutu pada lembaga PAUD dan PNF yang memenuhi SNP dimana di target kan, TK = 10, KB = 6 dan PKBM = 4 lembaga tidak dapat dilaksanakan dikarena pandemi Covid-19 sehingga untuk penilaiannya tersebut (Akreditasi) sudah dibatalkan. Dikrenakan lembaga yang sudah dinyatakan memenuhi SNP sekolah tersebut mesti sudah terakreditasi.

2. Capaian Kinerja Berdasar Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Unit Organisasi : Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SD 	5,43%	0,78%	5,43%

		<ul style="list-style-type: none"> Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen 	20,79%	20,79%	2,35%
--	--	---	--------	--------	-------

Dari tabel diatas terlihat bahwa Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen yang belum memenuhi target karena pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) tergantung dari penilaian 8 (delapan) SNP yang telah ditentukan :

1. Standar Kelulusan,
2. Standar Isi,
3. Standar Proses dan
4. Standar Penilaian (SNP Internal) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
5. Standar PTK,
6. Standar Sarpras,
7. Standar Pengelolaan dan
8. Pembiayaan (SNP Eksternal)

Untuk faktor Eksternal sebagian satuan pendidikan masih belum memenuhi Standar (PTK dan Sarpras).

Satuan Pendidikan jenjang SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sampai saat ini baru 37 sekolah (021 %) dari 175 sekolah yang ada dan belum memenuhi target yang ditetapkan, disebabkan satuan pendidikan belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam penilaian.

Unit Kerja : Kasi Kelembagaan & Sarana Prasarana, Bina SD

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya data sarana dan prasarana SD	Jumlah data sarana Prasarana SD yang telah diverifikasi.	74	76	178 Sekolah

2	Tersedianya data akses layanan pendidikan SD	Jumlah data akses layanan pendidikan SD yang telah diverifikasi.	178 Sekolah	178 Sekolah	178 Sekolah
3	Pembinaan Akreditasi Sekolah Dasar	- Jumlah SD yang di bina akreditasinya.	178 Sekolah	178 Sekolah	178 Sekolah

Pada tahun 2020 penyediaan data sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang telah diverifikasi dengan target 178 sekolah % dapat dilaksanakan sepenuhnya, begitupun untuk data akses layanan pendidikan Sekolah Dasar yang telah diverifikasi sebanyak 178 Sekolah dapat terlaksana sepenuhnya. Sementara Sarana dan Prasarana sekolah dengan kondisi baik/ lembaga yang dibangun/dilakukan rehab di targetkan 100 %, dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Sedangkan untuk Pembinaan Akreditasi Sekolah Dasar sebanyak 32 Sekolah Dasar dari usulan 32 Sekolah dasar yang diusulkan ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN S/M) Provinsi Kalimantan Selatan, namun karena pandemi covid 19 dan refocusing anggaran di BAN S/M sehingga mempengaruhi jumlah sekolah yang diakreditasi di kabupaten Tapin. Hanya sebanyak 3 sekolah dasar, Dinas Pendidikan dalam pembinaan akreditasi sekolah dasar ini bekerjasama dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi Kabupaten Tapin dan asisor kabupaten yaitu dengan sosialisasi Isian Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) dan ditindaklanjuti dengan pembinaan pengawas masing masing sekolah yang mendapatkan jatah untuk akreditasi tahun 2020, yang mana pelaksanaan penilaian akreditasi oleh asisor pada tahun 2020 ini menggunakan media video conferen.

Unit Kerja : Kasi Peserta Didik dan Pemb. Karakter Bina SD

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Lomba Prestasi bagi Siswa SD	Jumlah lomba prestasi SD yang dilaksanakan.	4 Lomba	0	4 Lomba

2	Terlaksananya pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD	Jumlah SD yang di bina PPDB.	178 Sekolah	0	178 Sekolah
3	Pendataan SD yang mendapatkan Bantuan	- Jumlah SD yang mendapatkan bantuan.	176 Sekolah	174 SDN 2 SDS	176 Sekolah
		- Jumlah siswa SD yang mendapatkan bantuan.		19.680 Siswa Bos : 18.240 PIP : 726 CSR : 416 Baznas : 234 SPM : 240	21.926 Siswa Bos :18.078 PIP : 3.500 CSR : 176 Baznas: 162 BRI :

Dari tabel tabel diatas terlihat jumlah Lomba Prestasi Jenjang SD yang dilaksanakan, Namun semua Lomba tidak dapat dilaksanakan karena dana dari APBD dialihkan ke Covid_19 dan memang ditiadakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan selatan dan oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Dan untuk Jumlah SD yang di bina PPDB pada tahun 2019 sebanyak 178 sekolah tetapi untuk tahun 2020 tidak ada karena tidak dapat turun langsung ke sekolah dalam membina dan memonitoring penerimaan Peserta Didik Baru karena masa pandemi Covid_19. Kita hanya menerima laporan dan data jumlah siswa baru dari semua sekolah lewat online.

Sementara Jumlah SD yang mendapatkan bantuan pada tahun 2019 sebanyak 176 sekolah dan tahun 2020 sebanyak 175 Negeri dan 3 Swasta, terdapat Kenaikan jumlah penerima bantuan karena ada tambahan 3 (tiga) sekolah swasta yang sudah terdaftar di dapodik tetapi hanya 1 sekolah yang baru dapat dana BOS.

Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan sebanyak 19.856 siswa dengan rincian :

1. Dana BOS = 18.240 siswa
2. PIP = 726 siswa
3. CSR = 416 siswa
4. BAZNAS = 234 siswa
5. BRI = 50 siswa
6. SPM = 240 siswa

Unit Kerja : Kasi Kurikulum & Penilaian Bidang Bina SD

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya data hasil belajar Siswa SD	Jumlah data hasil belajar Siswa SD yang telah diverifikasi.	3113 Siswa	3240 Siswa	3300 Siswa
2	Ujicoba USBN SD	Jumlah SD Yang Melaksanakan ujicoba USBN SD	175 Sekolah	175 Sekolah	175 Sekolah
3	Terlaksananya USBN SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti USBN SD	3113 Siswa	0 Siswa	3300 Siswa
4	Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar	Jumlah SD yang melaksanakan kurikulum 2013.	178 Sekolah	178 Sekolah	178 Sekolah
5	Terlaksananya Pembinaan Sekolah Dasar	- Jumlah SD yang di bina.	178 Sekolah	178 Sekolah	178 Sekolah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang capaian kinerja Kasi Kurikulum & Penilaian Bidang Bina SD pada tahun 2020 yaitu Jumlah data hasil belajar siswa SD yang telah diverifikasi sebanyak 3113 siswa pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 3240, Terjadi kenaikan jumlah data peserta didik kelas 6 yang dapat diverifikasi rata-rata nilai raportnya dan dari hasil

diadakannya ujicoba USBN SD, USBN SD dan Ujian Sekolah (US).

Untuk indicator Jumlah SD yang melaksanakan ujicoba USBN SD sebanyak 175 sekolah pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 masih tetap 175 sekolah yang melaksanakan kenapa, hal ini disebabkan 3 (tiga sekolah swasta belum ada siswa kelas 6 (enam). Tetapi jumlah peserta ujicoba SD meningkat seperti data yang sudah dijelaskan diatas, dengan diadakannya kegiatan tersebut dapat mengukur tingkat hasil belajar siswa untuk persiapan menghadapi USBN yang sebenarnya serta siswa terpacu belajar lebih giat lagi setelah melihat hasil nilai yang didapat pada ujicoba tersebut.

Kemuadian pada indicator Jumlah siswa yang mengikuti USBN SD pada tahun 2019 sebanyak 3113 siswa, tahun 2020 tidak ada, Kenapa di tahun 2020 tidak ada peserta USBN Karena di tahun tersebut USBN SD ditiadakan diganti dengan nama US (Ujian Sekolah) yang diadakan di masing masing sekolah dan juga bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, jadi penilaian kelulusan lebih sederhana dan tidak membebani siswa yang melaksanakan pembelajaran dari rumah (BDR) dan ujian sekolah melalui daring (dalam jaringan) sehingga rata - rata nilai Ujian Sekolah siswa mengalami kenaikan.

Serta indicator Jumlah SD yang melaksanakan kurikulum 2013 pada tahun 2019 sama dengan tahun 2020 sebanyak 178 sekolah, Mulai dari tahun 2019 sekolah sudah melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum 2013 karena semua sekolah di Indonesia diwajibkan oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum 2013 dan semua guru kelas dari kelas 1 s.d 6 sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan kurikulum 2013.

Dan Jumlah SD yang di Bina sebanyak 178 sekolah mulai dari tahun 2019 sampai sekarang semua sekolah di Kabupaten Tapin di bina melalui monitoring ke sekolah - sekolah bekerjasama dengan pengawas pembina masing-masing kecamatan sekabupaten Tapin.

3. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Bidang Pembinaan SMP

Unit Organisasi : Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemenuhan Standar Nasional Sekolah Menengah Pertama SMP	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP 	5,0%	6,0%	5,30%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen 	100%	100%	90%

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Dikeluarkannya PP No.19 tahun 2005 tentang SNP, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan madrasah. Adapun fungsinya adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Lingkup SNP meliputi delapan komponen pendidikan yaitu Standar Pengelolaan; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana Prasarana; Standar Pembiayaan; Standar Proses; Standar Isi; Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan. Ke delapan standar tersebut menjadi syarat bagi semua satuan pendidikan termasuk madrasah.

Beberapa masalah diantaranya kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, jumlah guru terbatas, biaya pendidikan masih mahal, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta angka putus sekolah yang juga masih tinggi. masih banyak yang belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui rapor mutu bahwa permasalahan pencapaian pemenuhan standar nasional pendidikan banyak terkendala pada empat standar. "Yaitu standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar pengelolaan,"

Berdasarkan tabel kinerja kepala bidang pembinaan SMP dengan indikator Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP dimana capaian SNP tahun 2020 dapat diketahui dari raport mutu masing masing sekolah , yang mana didalamnya terdapat 8 standar nasional pendidikan, dari 26 sekolah capai SNP terendah 4,61, tertinggi 5,59 sedangkan rata rata dari 26 sekolah tersebut 5,0

Dan untuk indikator Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Minimal 50 Persen tercapai 100 % ini didapat dari 26 sekolah yang melibehi SNP 5,0 ada 24 sekolah sedangkan 2 sekolah SNPnya dibawah 5,0 yaitu 4,74 dan 4,61 sedangkan target minimal 50% atau SNP 3 standar sudah tercapai 100% sebab semua sekolah SNPnya diatas 50% atau nilai SNPnya diatas 3,0.

Unit Kerja : Kasi Kelembagaan & Sarana Prasarana, Bidang
Pembinaan SMP

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya data sarana dan prasarana SMP	Jumlah data sarana Prasarana SMP yang telah diverifikasi.	-	26 Sekolah	26 Sekolah
2	Tersedianya data akses layanan pendidikan SMP	Jumlah data akses layanan pendidikan SMP yang telah diverifikasi.	-	26 Sekolah	26 Sekolah
3	Pembinaan Akreditasi Sekolah Menengah Pertama	- Jumlah SMP yang di bina akreditasinya.	-	26 Sekolah	26 Sekolah

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Jumlah data sarana Prasarana SMP yang telah diverifikasi. Dimana target kinerja sebanyak 26 sekolah yang diverifikasi tercapai sejumlah 26 sekolah yang diverifikasi. Demikian juga untuk Jumlah data akses layanan pendidikan SMP yang telah diverifikasi dimana target kinerja sebanyak 26 sekolah yang diverifikasi tercapai sejumlah 26 sekolah. Terkait dengan sarana dan prasara maka pada sekolah tertentu ada yang

sarananya sangan minim, karena keterbatasan alokasi dana ,maka untuk melengkapi sarpras dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas. Pada tahun 2020 penyediaan data sarana dan prasarana SMP yang telah diverifikasi dengan target 85% dapat dilaksanakan sepenuhnya, begitupun untuk data akses layanan pendidikan SMP yang telah diverifikasi sebanyak 26 Sekolah dapat terlaksana sepenuhnya.

Sedangkan untuk Pembinaan Akreditasi SMP sebanyak 26 Sekolah dapat di bina seluruhnya untuk persiapan tahun yang akan datang.dan untuk tahap pelaksanaan akreditasi tahun 2020 oleh BAN Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilaksanakan karena adanya pandemic Covid 19 yang akhirnya mempengaruhi anggaran di BAN SM.

Unit Kerja : Kasi Peserta Didik dan Pemb. Karakter Bidang
Pembinaan SMP

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Lomba Prestasi bagi peserta didik SMP	Jumlah lomba prestasi SMP yang dilaksanakan.	5 Lomba	4 Lomba	5 Lomba
2	Terlaksananya pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP	Jumlah SMP yang di bina PPDB.	26 Sekolah	26 Sekolah	26 Sekolah
3	Pendataan SMP yang mendapatkan Bantuan	- Jumlah SMP yang mendapatkan bantuan.	26 Sekolah	26 Sekolah	26 Sekolah
		- Jumlah siswa SMP yang mendapatkan bantuan.	-	558 Siswa	4.143 Siswa

Dari tabel diatas terlihat jumlah Lomba Prestasi Jenjang SMP yang dilaksanakan, Namun semua Lomba tidak dapat dilaksanakan karena dana dari

APBD dialihkan ke Covid_19 dan memang ditiadakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan selatan dan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dan untuk Jumlah SMP yang di bina PPDB pada tahun 2019 sebanyak 22 sekolah tetapi untuk tahun 2020 tidak ada karena tidak dapat turun langsung ke sekolah dalam membina dan memonitoring penerimaan Peserta Didik Baru karena masa pandemi Covid_19. Kita hanya menerima laporan dan data jumlah siswa baru dari semua sekolah lewat online.

Sementara Jumlah SD yang mendapatkan bantuan pada tahun 2019 sebanyak 176 sekolah dan tahun 2020 sebanyak 175 Negeri dan 3 Swasta, terdapat Kenaikan jumlah penerima bantuan karena ada tambahan 3 (tiga) sekolah swasta yang sudah terdaftar di dapodik tetapi hanya 1 sekolah yang baru dapat dana BOS.

Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan dengan rincian :

1. PT BMB = 130 siswa (bea siswa kurang mampu)
2. BAZNAS = 18 siswa (Uang Tunai)
3. BRI = 100 siswa (kacamata)
4. KNPI = 70 siswa (tas)
5. SPM = 240 (ATK siswa)

Unit Kerja : Kasi Kurikulum & Penilaian Bidang Pembinaan SMP

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya data hasil belajar Siswa SMP.	Jumlah data hasil belajar Siswa SMP yang telah Diverifikasi	100%	100%	100%
2	Ujicoba UN SMP	Jumlah SMP yang melaksanakan ujicoba UN SMP	100%	100%	26 Sekolah
3	Terlaksananya UN SMP	Jumlah Siswa yang mengikuti UN SMP	100%	100%	1.382 Siswa

4	Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang melaksanakan kurikulum 2013.	100%	100%	26 Sekolah
5	Terlaksananya Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Jumlah SMP yang di bina.	100%	100%	26 Sekolah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang capaian kinerja Kasi Kurikulum & Penilaian Bidang Bina SMP pada tahun 2020 yaitu Jumlah data hasil belajar siswa SMP yang telah diverifikasi sebanyak 26 sekolah pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 26 sekolah, 1 Dengan adanya wabah covid 19 maka UN ditiadakan/dibatalkan untuk jenjang SMP karena keamanan dan kesehatan lebih penting. dengan dibatalkannya UN maka syarat kelulusan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Bagi sekolah yang sudah melaksanakan US maka dapat menggunakan nilai US untuk menentukan kelulusan siswa.
2. Bagi sekolah yang belum melaksanakan US maka berlaku ketentuan :
 - a. Kelulusan SMP sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir.
 - b. Nilai semester genap kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan

Untuk indikator kinerja Jumlah SMP yang melaksanakan ujicoba UN SMP, ini tidak bisa dilaksanakan karena pandemic covid 19.namun untuk indicator Jumlah Siswa yang mengikuti UN SMP ini tercapai dengan data 26 sekolah.

Serta indicator Jumlah SMP yang melaksanakan kurikulum 2013 pada tahun 2019 sama dengan tahun 2020 sebanyak 26 sekolah, Mulai dari tahun 2019 sekolah sudah melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum 2013 karena semua sekolah di Indonesia diwajibkan oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum 2013 dan semua guru sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan kurikulum 2013.

Dan Jumlah SD yang di Bina sebanyak 26 sekolah mulai dari tahun 2019 sampai sekarang semua sekolah di Kabupaten Tapin di Bina melalui monitoring ke sekolah - sekolah bekerjasama dengan pengawas pembina masing-masing satuan pendidikan sekabupaten Tapin dan juga pembinaan melalui kegiatan

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP.

4. Capaian Kinerja Bidang Ketenagaan

Unit Organisasi : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Tahun Anggaran : 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.	- Persentase Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.	92 %	81,36 %
		- Persentase Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.	80 %	52,34 %
2.	Meningkatnya pemenuhan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan PAUD.	- Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD minimal 80 persen.	82 %	80,74 %
		- Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP minimal 80 persen.	95 %	94,01 %
		- Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada PAUD minimal 80 persen.	100%	100 %

Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, dan (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Dapat diartikan pengelolaan

pendidikan sebagai supaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.

Dan dalam UU guru dan dosen dalam BAB II (kompetensi dan sertifikasi) pasal 2 “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 kompetensi guru sebagai mana yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.(Undang-Undang Guru dan Dosen).. Maka terdapat beberapa hal yang perlu lebih dicermati bersama bahwa poin penting dari PP SNP dalam perkara ini adalah menetapkan bahwa setiap pendidik di setiap jenjang pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik minimum D4 atau sarjana (S1) pada bidang/program pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan atau sesuai dengan jenjang tempat mengajar, dan harus pula memiliki sertifikat profesi guru .

Menyangkut kondisi kinerja dengan Persentase Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Dan Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD minimal 80 persen. Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang ketenagaan dimana untuk kualifikasi pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tercapai sebesar 81,36 % penyebab menurunnya ini karena pada umumnya guru yang berpendidikan di bawah S1 tidak lagi melanjutkan ke S1 karena menurunnya minat untuk mengembangkan diri karena factor usia mendekati masa pensiun. Dan untuk Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD minimal 80 persen. Hanya tercapai 52,34% dari target 80% hal ini dipengaruhi banyak tenaga kependidikan yang pensiun dan kurangnya penerimaan dan pengangkatan PNS. Dimana penerimaan CPNS tahun 2020 tidak ada, proses penerimaan pada tahun 2020 yang pembagian SK nya ditahun 2021.

Kemudian Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD minimal 80 persen tercapai 80,74% dari target 82%. Sedangkan Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP minimal 80 persen tercapai 94,01% dari target 95%. Serta Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada PAUD minimal 80 persen tercapai 100% dari target 100%. Dari pencapaian target 3 indikator diatas rata rata sudah diatas 80%

hal dipengaruhi oleh penerimaan Guru CPNS dan jumlah guru yang pensiun ditahun 2020.

Unit Kerja : Kasi PTK PAUD dan PNF Bina Ketenagaan
Tahun Anggaran : 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yang valid.	Jumlah laporan data PTK PAUD yang telah diverifikasi.	80%	83%
2	Tersedianya data Calon kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah PAUD yang valid.	Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah PAUD yang telah diverifikasi.	80%	85%
3	Tersedianya data Pemenuhan Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang valid.	Jumlah laporan data pemenuhan PTK PAUD yang telah diverifikasi.	85%	88%
4	Tersedianya data pendidik PAUD bersertifikat yang valid.	Jumlah laporan data pendidik PAUD bersertifikat yang telah diverifikasi.	85%	88%

Klasifikasi Pendidikan merupakan syarat utama yang di miliki tenaga pendidik dan kependidikan di satuan pendidikan khususnya Sarjana untuk memperoleh pengajuan sertifikasi guru karena itu di "wajibkan" tenaga pendidik dan kependidikan menempuh jenjang minimal Sarjana (SI). Mengenai Tersedianya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yang valid dengan indikator kinerja Jumlah laporan

data PTK PAUD yang telah diverifikasi pada tabel diatas terlihat bahwa capaiannya sebesar 83% dari target 80%.

Mengenai sasaran kegiatan dengan indikator Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah PAUD yang telah diverifikasi dengan indikator kegiatan Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah PAUD yang telah diverifikasi dengan capaian kinerja sebesar 85% dari target 80%. Adanya kegiatan seleksi Calon Kepala Sekolah yang di adakan oleh Pusat dengan biaya APBN di lakukan secara Daring dengan berbagai macam persyaratan maka di dapat 3 orang peserta yang mengikuti seleksi dan di nyatakan lulus merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah PAUD / TK yang ada.

Kemudian untuk sasaran kegiatan Tersedianya data Pemenuhan Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang valid, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah laporan data pemenuhan PTK PAUD yang telah diverifikasi ini telah tercapai sebesar 88% dari 85% target. Pembuatan laporan pemenuhan PTK PAUD ini berdasarkan data laporan bulanan sekolah atau rekap yang kami terima baik secara on line maupun manual untuk mengetahui data tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Sedangkan untuk sasaran kegiatan Tersedianya data pendidik PAUD bersertifikat yang valid dengan indikator Jumlah laporan data pendidik PAUD bersertifikat yang telah diverifikasi dengan capaian kinerja sebesar 88% dari target 85%. Pengolah laporan ini bersadarkan data yang diambil melalui dapodik bertujuan untuk mengetahui ke Validan data keadaan tenaga pendidik yang bersertifikat.

Unit Kerja : Kasi PTK SD Pembinaan Ketenagaan

Tahun Anggaran : 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SD yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yang	Jumlah laporan data PTK SD yang telah diverifikasi.	2 Laporan	100%

	valid.			
2	Tersedianya data Calon kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SD yang valid.	Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SD yang telah diverifikasi.	2 Laporan	100%
3	Tersedianya data Pemenuhan Pendidik dan tenaga kependidikan SD yang valid.	Jumlah laporan data pemenuhan PTK SD yang telah diverifikasi.	2 Laporan	85%
4	Tersedianya data pendidik SD bersertifikat yang valid.	Jumlah laporan data pendidik SD bersertifikat yang telah diverifikasi.	2 Laporan	90%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan sasaran kegiatan tersedianya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SD yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yang valid dengan indikator Jumlah laporan data PTK SD yang telah diverifikasi tercapai 100% dari target 2 laporan yang telah ditetapkan, dimana data Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah Dasar sudah lengkap, tetapi masih ada tenaga pendidikan yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan dikarenakan faktor usia dan biaya yang belum tersedia dan juga rendahnya motivasi diri untuk meningkat kualifikasi pendidikan.

Kemudian sasaran kegiatan tersedianya data Calon kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SD yang valid dengan indikator Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SD yang telah diverifikasi dengan capaian 100% dari target 2 laporan. Untuk calon Kepala Sekolah Dasar pada umumnya minat guru menjadi kepala sekolah masih rendah dikarenakan tunjangan yang kurang menggiurkan kepala sekolah yang ada seolah berlaku selamanya. Sedangkan sasaran kegiatan Tersedianya data Pemenuhan Pendidik dan tenaga kependidikan SD yang valid dengan indikator jumlah laporan data pemenuhan PTK SD yang telah diverifikasi terdapat capaian 85% dari target 2 laporan, secara garis besarnya untuk pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini sangat terbatas untuk pengangkatan tenaga yang baru relatif masih sangat kurang, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maka mengangkat tenaga dengan SK perjanjian kerja yang didanai dari anggaran yang relevan. Serta sasaran kegiatan Tersedianya data pendidik SD

bersertifikat yang valid dengan indikator Jumlah laporan data pendidik SD bersertifikat yang telah diverifikasi. ini tercapai sebesar 90% dari target 2 laporan, peningkatan jumlah guru bersertifikasi ini dipengaruhi oleh jumlah guru yang mengikuti peningkatan profesional guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan berhubung dikarenakan masa vandemi Covid 19 untuk tahun 2020 dilaksanakan melalui daring.

Unit Kerja : Kasi PTK SMP Bina Ketenagaan

Tahun Anggaran : 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
1	Tersedianya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yang valid.	Jumlah laporan data PTK SMP yang telah diverifikasi.	80%	93%	93%
2	Tersedianya data Calon kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SMP yang valid	Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SMP yang telah diverifikasi	70%	91 %	91 %
3	Tersedianya data Pemenuhan Pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang valid	Jumlah laporan data pemenuhan PTK SMP yang telah diverifikasi	90%	79%	80%
4	Tersedianya data pendidik SMP bersertifikat yang valid	Jumlah laporan data pendidik SMP bersertifikat yang telah diverifikasi	95%	68%	70%
5	Pemenuhan peningkatan sertifikasi guru SMP melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Jumlah PTKSMP yang mengikuti PPG	50 orang		1 orang Dana APBN

Untuk capaian kinerja kasi PTK SMP dimana untuk Tersedianya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yang valid.dengan indikator kegiatan Jumlah laporan data PTK SMP yang telah diverifikasi.capaian kinerja sebesar 93% dari target 80%, Pengumpulan dan penyiapan data untuk penghitungan data pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data laporan bulanan dan pembagian tugas sehingga dapat mengetahui jumlah data pendidik tercapainya Pemenuhan Kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan karena adanya syarat untuk mempunyai sertifikat Pendidik harus mempunyai minimal S1/D.IV. sementara untuk Tersedianya data Calon kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SMP yang valid dengan indikator jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SMP yang telah diverifikasi terelisasi sebesar 91% dari target 80% yang mana pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah untuk persyaratan menduduki jabatan sebagai kepala sekolah harus mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah dan untuk tersedianya data Pemenuhan Pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang valid dengan indikator jumlah laporan data pemenuhan PTK SMP yang telah diverifikasi.

Kemudian untuk tersedianya data pendidik SMP bersertifikat yang valid dengan indikator jumlah laporan data pendidik SMP bersertifikat yang telah diverifikasi telah terelisasi sebesar 70% dari target 95%, pemeriksaan Kevaletan data guru dari aplikasi simtun yang diambil dari data dapodik. Dan untuk Pemenuhan peningkatan sertifikasi guru SMP melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan indikator jumlah PTKSMP yang mengikuti PPG ini sehubungan Pandemi Corona Covid ditahun 2020 maka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPG dajab) tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka tetapi hanya melalui daring yaitu sebanyak 1 orang dengan Dana APBN.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan program, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam rangka

pelaksanaan anggaran, instansi pemerintah membutuhkan dana yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan dengan tujuan terwujudnya proses pendidikan yang demokratis dengan memperhatikan keragaman kebutuhan daerah dan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2019, Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020, didukung dengan dana sejumlah **Rp. 235.537.550.286,-** yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa Kemudian Belanja Modal **Rp. 6.681.570.730,-**. Alokasi belanja belanja operasi **Rp. 224.331,227,100,-** belanja langsung sebesar **Rp. 14,779,623,500,-**

Dibawah ini disampaikan capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 melalui Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin :

Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	207.266.248.188	184.949.779.611	22.316.468.577	89,23
Belanja Langsung	28.271.302.098,00	27.696.036.867.52	575.265.230,48	97,97
Jumlah Pagu Keseluruhan	235.537.550.286	212.645.562.705,52	22.891.987.580,48	90,28

Kemudian anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sbb:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.137.463.198,00	1.036.582.981,00	91,13
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	139.845.470,00	110.812.473,00	79,24
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	55.200.000,00	55.200.000,00	100,00
3	Penyediaan alat tulis kantor	171.893.566,00	164.942.820,00	95,96
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5	Penyediaan makanan dan minuman	164.870.000,00	159.010.000,00	96,45
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	164.870.000,00	159.010.000,00	96,45
7	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	15.000.000,00	14.312.500,00	95,42
8	Tapin Expo	20.000.000,00	0,00	0,00
2	Prog Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	217.038.000,00	208.714.284,00	96,16
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.000.000,00	64.011.784,00	91,45
10	pemeliharaan Rutin Dan Berkala Gedung / Kantor Disdikkab./ Upt Disdik Kec.	70.000.000,00	64.011.784,00	91,45
11	Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan Disdik	51.908.000,00	50.712.500,00	97,70
12	Sertifikat Tanah	300.000,00	0,00	0,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	13 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	14 Penyusunan laporan keuangan semesteran/akhir tahun	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	675.300.000,00	672.884.000,00	99,64
	15 Pembinaan PAUDNI	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
	16 Hari Anak Nasional	300.000,00	0,00	0,00
	17 Pembangunan Infrastruktur PAUD	150.000.000,00	149.764.200,00	99,84
	18 Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD Non Fisik	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
	19 Peningkatan mutu satuan PAUD	19.375.000,00	17.495.000,00	90,30
	20 Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (DAK 2020)	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00
	21 BOP PAUD DAK Non Fisik TK Negeri Pembina Binuang Tahun 2020	279.325.000,00	279.324.800,00	100,00
	22 BOP PAUD DAK Non Fisik TK Negeri Pembina Rantau Tahun 2020	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00
5	Program Pendidikan Non Formal	891.367.900,00	869.625.275,00	97,56
	23 Penyelenggaraan Paket C Lanjutan	123.900,00	0,00	0,00
	24 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	7.410.000,00	7.410.000,00	100,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	25 Penyelenggaraan Paket A	90.000,00	0,00	0,00
	26 Penyelenggaraan Paket B	90.000,00	0,00	0,00
	27 BOP PKBM	90.000,00	0,00	0,00
	28 Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi	90.000,00	0,00	0,00
	28 Hari Aksara Internasional (HAI)	90.000,00	0,00	0,00
	29 Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK 2020)	546.859.000,00	534.600.275,00	97,76
	30 BOP Kesetaraan DAK Non Fisik Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Kabupaten Tapin	223.800.000,00	221.720.000,00	99,07
	31 Peningkatan Mutu Satuan PNF	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00
	32 Pendataan Siswa Putus Sekolah Se Kabupaten Tapin	88.925.000,00	82.095.000,00	92,32
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan	134.690.000,00	109.940.000,00	81,62
	33 Pelaksanaan Sertifikasi Guru	25.000.000,00	9.550.000,00	38,20
	34 Penilaian Angka Kredit Fungsional dan bintek Jafung	21.140.000,00	21.140.000,00	100,00
	35 Seleksi Cakep dan Pengawas Sekolah	300.000,00	0,00	0,00
	36 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru	87.950.000,00	79.250.000,00	90,11
	37 Pendidikan Profesi Guru	300.000,00	0,00	0,00
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.717.450.300,00	2.697.481.000,00	99,27

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
38	Pemutahiran Data Pendidikan	32.500.000,00	32.300.000,00	99,38
39	Karnaval HUT RI	1.520.300,00	970.000,00	63,80
40	Peringatan Hari Guru Nasional	17.000.000,00	13.150.000,00	77,35
41	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	970.000,00	970.000,00	100,00
42	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	2.643.460.000,00	2.633.431.000,00	99,62
43	Pengelolaan Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (KPA S/M)	22.000.000,00	16.660.000,00	75,73
8	Program Pembinaan SD	13.344.789.700,00	13.275.485.264,52	99,48
44	Asistensi Pelaksanaan US SD	118.537.500,00	118.537.500,00	100,00
45	Penyusunan dan Penggandaan soal ujicoba UAS SD	81.298.000,00	80.358.000,00	98,84
46	Manajemen Tim BOS Kab. Tapin	92.190.300,00	91.570.300,00	99,33
47	Khataman Al-Qur'an Massal	300.000,00	0,00	0,00
48	Pembangunan SD	1.811.844.900,00	1.809.819.032,00	99,89
49	Revitalisasi SD (DAK 2020)	9.090.619.000,00	9.049.334.900,52	99,55
50	Pembangunan Pagar Sekolah	2.150.000.000,00	2.125.865.532,00	98,88
9	Program Pembinaan SMP	9.138.203.000,00	8.810.324.063,00	96,41
51	Biaya Operasional Ujian Nasional (UN) SMP/MTs	41.885.000,00	41.885.000,00	100,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
52	Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	18.916.000,00	17.676.000,00	93,44
53	Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP	300.000,00	0,00	0,00
54	Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP	4.090.000,00	0,00	0,00
55	Peningkatan Kompetensi Mata Pelajaran UN Siswa SMP	58.068.000,00	58.068.000,00	100,00
56	Peningkatan Kompetensi Mata Pelajaran Olimpiade Sains Nasional	1.050.000,00	0,00	0,00
57	Liga Sepak Bola (GALA) Siswa Indonesia Tingkat SMP	68.000.000,00	65.534.500,00	96,37
58	Pembangunan SMP	325.000.000,00	229.979.200,00	70,76
59	Revitalisasi SMP (DAK 2020)	7.140.894.000,00	6.949.912.663,00	97,33
60	Pembangunan Pagar Sekolah	1.480.000.000,00	1.447.268.700,00	97,79
	TOTAL	28.271.302.098,00	27.696.036.867.52	97,97

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 anggaran untuk dana belanja sejumlah **Rp. 235.537.550.286,-** terealisasi **Rp 212.645.562.705,52,- (90,28%)**, yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja Operasi dan belanja Modal. Alokasi **belanja Operasi Rp. 213.411.128.386** terealisasi **Rp 190.805.625.076 (92,23%)**, - serta **Belanja Modal** sebesar **Rp. 22.126.421.900** terealisasi **Rp. 21.839.937.629,52,- (98,71%)**.

Capaian realisasi per program pada Dinas Pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp. **1.137.463.198,-** terealisasi sebesar Rp. **1.036.582.981,-** atau **91,13%**
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp. **217.038.000,-** terealisasi sebesar Rp. **208.714.284,-** atau **96,16%**
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran Rp **15.000.000,-** terealisasi sebesar Rp. **15.000.000,-** atau **100%**
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan jumlah anggaran Rp. **675.300.000,-** terealisasi sebesar Rp. **672.884.000,-** atau **99,64%**
5. Program Pendidikan Non Formal dengan jumlah anggaran Rp. **891.367.900,-** terealisasi sebesar Rp. **869.625.275,-** atau **97,56%**
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah anggaran Rp. **134.690.000,-** terealisasi sebesar Rp. **109.940.000,-** atau **81,62%**
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan jumlah anggaran Rp. **2.717.450.300,-** terealisasi sebesar Rp. **2.697.481.000,-** atau **99,27%**
8. Program Pembinaan Sekolah Dasar dengan jumlah anggaran Rp. **13.344.789.700,-** terealisasi sebesar Rp. **13.275.485.264,-** atau **99,48%**
9. Program Pembina/an Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah anggaran Rp. **9.138.203.000,-** terealisasi sebesar Rp. **8.810.324.063,-** atau **96,41%**

Dengan menganalisa daftar perbandingan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2020 maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Anggaran Dinas pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020 dengan alokasi dana sebesar **Rp. 22.126.421.900** terealisasi **Rp. 21.839.937.629,52,-** terealisasi (**98,71%**) dengan 9 program dan 63 kegiatan,

dengan serapan dana sebesar Rp 21.839.937.629,52,- sehingga masih ada dana yang belum terserap Rp 289.484.271,- atau sebesar 1,29%, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan juga efisiensi dana serta waktu pelaksanaan kegiatan, dari yang seharusnya 100%, dan juga pengaruh dari refocussing akibat dari pandemi covid-19 di indonesia.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin selama Tahun 2020. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin merupakan gambaran kinerja Dinas Tahun 2020, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun 2020.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Tahun 2020 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin telah melaksanakan kegiatan rutin maupun pembangunan dengan capaian target/realisasi anggaran belanja sebesar sejumlah Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, anggaran untuk dana belanja sejumlah **Rp. 235.537.550.286,-** yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa Kemudian Belanja Modal **Rp. 6.681.570.730,-**. Alokasi belanja belanja operasi **Rp. 224.331,227,100,-** belanja langsung sebesar **Rp. 14,779,623,500,-**

Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2020 maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Anggaran Dinas pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020 bisa dikatakan berkinerja baik dengan alokasi dana Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 anggaran untuk dana belanja sejumlah **Rp. 235.537.550.286,-** terealisasi **Rp 212.645.562.705,52,- (90,28%)**, yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu

belanja Operasi dan belanja Modal. Alokasi **belanja Operasi Rp. 213.411.128.386** terealisasi **Rp 190.805.625.076 (92,23%)**, - serta **Belanja Modal sebesar Rp. 22.126.421.900** terealisasi **Rp. 21.839.937.629,52.- (98,71%)**. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan juga efisiensi dana serta waktu pelaksanaan kegiatan, dari yang seharusnya 100% .

Untuk realisasi capaian kinerja Dinas Pendidikan yaitu : Persentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B 25,69%, Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B 21,42%, Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B 79,21%, Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B 96,15%, Rata rata nilai US/UN SD/MI 68,23, Rata rata nilai US/UN SMP/MTs 78,91. Serta persentase guru yang professional (bersertifikasi) sebesar 50,06%. Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran, program dan kebijakan menunjukkan penilaian yang baik. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut diinterpretasikan bahwa kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin termasuk kategori baik.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan anggaran yang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan karena dari anggaran yang tersedia lebih banyak untuk belanja tidak langsung daripada belanja langsung.

4.2 SARAN-SARAN

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian target, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin ke depan berupaya untuk mengatasi masalah serta kendala yang ada, dengan kiat – kiat sebagai berikut :

- a. Berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pegawai yang ada dengan pembinaan secara intensif;
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi oleh pejabat terkait agar pencapaian dari setiap program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. Membuat perencanaan kegiatan dengan matang agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga gagalnya kegiatan karena masalah keterbatasan waktu dapat terhindar;

- d. Berusaha untuk memaksimalkan pelayanan serta memperluas cakupan sasaran sehingga semakin mendekati terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat;
- e. Meningkatkan koordinasi penanganan masalah di lapangan dengan instansi/pihak terkait.;
- f. Partisipasi masyarakat di bidang pendidikan sangat diperlukan guna mendukung pendidikan yang berkualitas;
- g. Semua unsur yang terlibat dalam bidang pendidikan agar lebih memberikan perhatian dan dukungan nyata dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- h. Sangat diharapkan adanya percepatan penerbitan juknis penggunaan DAK oleh Kemendikbud. Selama ini juknis selalu terlambat penerbitannya sehingga sangat berdampak terhadap penyerapan dan kualitas kegiatan karena dikejar oleh waktu dalam penyelesaiannya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tahun anggaran 2020, diharapkan dapat memenuhi harapan semua pihak dan bermanfaat untuk pemerintah maupun masyarakat.